



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan bimbingan dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar dapat terselesaikan dengan baik dan lengkap. Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sebagai upaya melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah menuju tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam laporan ini, disajikan pencapaian sasaran kinerja dalam kurun waktu 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2023 dengan fokus pada program-program prioritas. Selain itu, penyusunan laporan ini juga dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BPKPAD Kabupaten Banjar Tahun 2023 dan merupakan bagian dari evaluasi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan di masa mendatang.

Semoga LKjIP ini dapat bermanfaat bagi daerah Kabupaten Banjar khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan,pendapatan dan aset daerah dalam rangka untuk menyelaraskan visi Kepala Daerah yaitu “ **Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**”, dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dalam menyelenggarakan program dan kegiatan

berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis serta berkesinambungan. Selain itu Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah juga mengemban misi ke-4 yaitu “**Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif**”, serta meningkatkan fasilitasi penyaluran bantuan keuangan dan sosial pada masyarakat dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan azas profesionalisme dan standar pelayanan prima.

Martapura, 31 Januari 2024
Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar

Drs.ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
NIP. 19660104 198602 1 004

LKJIP BPKPAD KAB. BANJAR	II

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP BPKPAD Kabupaten Banjar tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja BPKPAD Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti - bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra BPKPAD Kabupaten Banjar 2021 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2023 telah berhasil dicapai.

LKJIP BPKPAD KAB. BANJAR	III

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPAD menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2023 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang transparan, tertib, akuntabel dan profesional serta dalam rangka mewujudkan misi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif melalui Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai dengan prosedur dan perundang - undangan yang berlaku,selanjutnya Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran tersebut merupakan ikhtisar dari beberapa hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi BPKPAD. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur Tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja atas sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut :

LKJIP BPKPAD KAB. BANJAR	IV

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkatkan	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) adalah suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilaikualitas kinerja tata kelola keuangan dan asset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKAD diukur melalui 4 (empat) dimensi meliputi: 1. Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik; 2. Persentase perangkat daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional	$IPKAD = (a + b + c + d) : 4$ Keterangan : <i>a = Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik</i> <i>b = Persentase perangkat daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak</i> <i>c = Persentase perangkat daerah dengan penyajian laporan keuangan dengan kategori baik</i> <i>d = Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik</i>	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PEN DAPATAN DAN ASET DAERAH	Nilai IPKAD	ESSELON II

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
			serta kertas kerja pajak; 3. Persentase perangkat daerah dengan penyajian laporan keuangan dengan kategori baik; dan 4. Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib.	<i>Daerah yang baik dan tertib</i>			
2	Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD.	Perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya; Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{\text{realisasi tahun } n - \text{realisasi tahun } n-1}{\text{realisasi tahun } n-1} \times 100 \%$	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RPJMD	ESSELON II

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
			adalah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.				

Sumber : Surat Keputusan IKU BPKPAD TA. 2023

LKJIP BPKPAD KAB. BANJAR	VII

Dari ilustrasi tabel di atas dapat dijelaskan untuk sasaran strategis (1) Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) dan target 94,34 % . Berdasarkan hasil penilaian Tim Indeks Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah didapat nilai indeks 96,02 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik.Untuk Sasaran strategis (2) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target 4 %.Persentase realisasi pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 30%. dengan persentase capaian 750%.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan persentase peningkatan PAD perlu dilakukan perumusan kategori tingkat pencapaiannya. Pada tabel berikut dibuat beberapa kategori tingkat keberhasilan, sebagai berikut :

Kategori Capaian	Uraian	Keterangan
A	apabila rata2 capaian kinerja lebih dari 110%;	Sangat Baik
B	apabila 90% < rata2 capaian kinerja< 110%;	Baik
C	apabila 60% < rata2 capaian kinerja < 90%;	Cukup
D	apabila 40% < rata2 capaian kinerja < 60%	Kurang
E	apabila rata2 capaian kinerja < 40%	Buruk

Sumber Data: Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021

Berdasarkan kategori keberhasilan tabel diatas, bahwa capaian PAD dengan persentase capaian pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 750%. Nilai ini masuk dalam kategori “A” yaitu “Sangat Baik”.

Berdasarkan hasil rekapitulasi target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 dan 2023 data sampai dengan 31 Desember 2023, Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 114,17%, dengan rincian sebagai berikut:

LKJIP BPKPAD KAB. BANJAR	VIII

Uraian	Realisasi 2022	Target Perubahan 2023	Realisasi 2023	Peningka tan (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	201.527.482.752, 77	250.300.000.000	277.948.453.970,04	111,05 %
Pajak Daerah	93.731.388.091, 00	96.196.000.000,00	109.824.795.009,00	114,17 %
Retribusi Daerah	6.599.136.034,0 0	8.263.062.975,00	8.372.925.539,00	101,33 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.167.770.066,0 0	11.083.090.240,00	8.916.250.334,00	80,45 %
Lain-Lain PAD Yang Sah	94.011.058.809, 77	134.757.846.785,0 0	150.834.483.088,04	111,93%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 31 Desember 2023 dan 2022

Dari ke empat komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut, hanya 2 komponen yang berada dalam wewenang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 109.824.795.009,00 dari target Rp.96.196.000.000,00 dengan peningkatan 114,17%. Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 8.372.925.539,00 dari target Rp.8.263.062.975,00 dengan peningkatan 101,33%.

Capaian peningkatan tersebut diatas target yang hanya 4%. Tetapi secara total peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 30%, karena salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lain mengalami penurunan pendapatan, yaitu pada komponen Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang kewenangan tidak berada dibawah Badan

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sehingga terdapat kesulitan pada intervensi dan koordinasi untuk meningkatkan PAD. Berdasarkan hasil tersebut, komponen Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sangat mempengaruhi capaian PAD dan nilai peningkatan PAD maka pada tahun 2023 akan dilaksanakan koordinasi dan intervensi secara lebih massif dan komprehensif agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar dapat tercapai dengan maksimal.

Tantangan keberhasilan akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat dan keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi.

Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan BPKPAD Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi BPKPAD dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Total pagu yang tersedia sebesar Rp. 285.527.442.669,- dengan realisasi keuangan s.d 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.275.165.507.421,- atau 96%. Dengan rincian realisasi keuangan pada program utama sebesar Rp.232.654.131.138,- dari total pagu sebesar Rp.235.453.900.867,- yaitu mencapai 98,81%.Sedangkan realisasi keuangan pada program pendukung sebesar Rp.42.511.376.283,- dari total pagu sebesar Rp.50.073.541.802,- yaitu mencapai 85%.

LKJIP BPKPAD KAB. BANJAR	X

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... I

RINGKASAN EKSEKUTIF III

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

 A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN..... 1

 B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI 2

 C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..... 27

 D. ISU STRATEGIS 30

 E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 31

BAB II 32

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... 32

 A. INDIKATOR KINERJA UTAMA..... 32

BAB III 99

AKUNTABILITAS KINERJA..... 99

BAB IV..... 357

P E N U T U P 357

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keadaan Pejabat Struktural BPKPAD Berdasarkan Jenis Kelamin..... 4

Tabel 1.2 Jumlah PNS BPKPAD.....5

Tabel 1.3 Identifikasi Permasalahan BPKPAD.....26

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....34

Tabel 2.2 Penerapan Kinerja Tahun 2023..... 38

Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja.....100

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2023.....101

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi/Capaian Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya..... 153

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Periode Akhir.....185

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022 Realisasi Provinsi dan Nasional..... 186

Tabel 3.6 Sasaran I Realisasi Indikator BPKPAD Tahun 2023.....188

Tabel 3.7 Sasaran II Realisasi Indikator BPKPAD Tahun 2023.....199

Tabel 3.8 Realisasi Jenis Belanja..... 204

Tabel 3.9 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....205

Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....212

Tabel.3.11 Efisien Penggunaan Sumber Daya.....248

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi BPKPAD.....25

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan rata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia.

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

Dengan disusunnya laporan kinerja instansi pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
2. Mendorong Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 tahun.
5. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
6. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam

- pelaksanaan tugas
7. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah kepada Bupati.
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintah Bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai Pajak Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar; dan
- m. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Kerja;
- n. Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah;

B.1 KEDUDUKAN :

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar merupakan unsur penunjang urusan pemerintah bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 TUGAS :

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

B.3 FUNGSI :

B.3.1 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

B.3.1.1 Kondisi riil pegawai berdasar jabatan

a. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural di Badan Pengelolaan Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar Eselon III terdiri dari 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, sedangkan eselon IV terdiri dari 9 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di BPKPAD Kabupaten Banjar. Jumlah pejabat struktural di BPKPAD Kabupaten Banjar dijelaskan pada gambar 1 berikut :

Tabel 1.1 Keadaan Pejabat Struktural BPKPAD Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Eselon II/b	1	-	1
2	Eselon III/a	1	-	1
3	Eselon III/b	4	2	6

4	Eselon IV/a	10	10	19
Jumlah		16	12	27

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Banjar 2023

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	IV/c	1
2	IV/b	2
3	IV/a	6
4	III/d	17
5	III/c	10
6	III/b	4
7	III/a	19
8	II/d	3
9	II/c	3
10	II/b	-
11	II/a	-
Jumlah		65

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Banjar 2023

Berdasarkan gambar tabel diatas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pangkat/golongan III sebanyak 50 orang, pangkat/golongan IV sebanyak 9 orang, pangkat/golongan II sebanyak 6 orang, realita tersebut menunjukkan bahwa kalau ditinjau dari segi kepangkatan/golongan menunjukkan bahwa BPKPAD telah memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai yang memiliki pangkat/golongan III dan IV mencapai 59 orang atau 91% dan yang memiliki pangkat/golongan II mencapai 6 Orang atau 9% dari total pegawai yang dimiliki BPKPAD pada tahun 2023

B.3.1.2 Kondisi riil pegawai berdasarkan pendidikan

Kebutuhan pegawai untuk tiap jenis jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Pada posisi jabatan struktural kebutuhan sebanyak 28 jabatan pada tahun 2023 , jumlah jabatan tersebut telah dapat terisi sepenuhnya dengan baik, baik pada posisi jabatan eselon II, eselon III dan eselon IV.
- 2. Kebutuhan Jabatan Fungsional Umum BPKPAD diasumsikan setiap eselon IV pada masing-masing bidang minimal memiliki staf sebanyak 2 orang dan setiap eselon IV pada sekretariat memiliki 3 orang staf, maka pegawai fungsional umum yang diperlukan adalah sebanyak 63 orang. Namun pada saat ini BPKPAD hanya memiliki sebanyak 37 orang tenaga fungsional umum, dengan demikian BPKPAD masih membutuhkan sebanyak 26 orang tenaga fungsional umum untuk menunjang jalannya kegiatan di BPKPAD.

B.3.1.3 Tenaga kontrak waktu tertentu

Selain pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPKPAD di dukung oleh tenaga kontrak waktu tertentu, tercatat sebanyak 62 orang, dengan rincian 4 orang petugas kebersihan,2 orang petugas keamananan, 1 orang sopir dan 55 orang tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan yang disesuaikan dengan

keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung berjalannya tugas sehari-hari pada Badan Pengelolaan Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi , Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar memiliki Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang,urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

- Adapun Rincian Uraian Tugas Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar adalah :
 - a. merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis bidang anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah;
 - c. menyelenggarakan kegiatan bidang anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah;
 - d. mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Badan;
 - e. mengawasi dan mengendalikan bidang anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah;
 - g. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah;
 - h. menyelenggarakan standar pelayanan minimal di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 - i. membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan Badan;
 - j. merumuskan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah serta tugas-tugas pembantuan lainnya;

- k. membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- l. melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

Unsur-unsur Organisasi Badan terdiri dari :

a. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan Aset di lingkungan Badan;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut :

- a. penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;

menyusun program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; (kata penyusunan untuk fungsi, kalau uraian menyusun)
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
- f. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (aset);
- g. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Badan;
- h. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelolaan Barang Milik Daerah (aset);
- i. mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;

- j. menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja Badan serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Badan;
 - k. menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
 - l. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjaminan kenaikan pangkat pegawai, penjaminan kenaikan gaji berkala, penjaminan cuti, absensi pegawai;
 - m. melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Badan;
 - n. menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
2. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, sebagai berikut :
- a. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Badan beserta dokumen penunjangnya;
 - d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - e. menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Badan;
 - f. menyusun Profil Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Badan;
 - g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - h. menyusun laporan program dan kegiatan Badan secara berkala berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Badan;
 - i. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Badan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, sebagai berikut :

- a. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, aset dan akuntansi keuangan Badan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- d. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang unit;
- f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

b. Bidang Anggaran;

Bidang Anggaran mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan program perencanaan, penyusunan dan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan perencanaan, penyusunan dan analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. pengkoordinasian kegiatan penyusunan KUA/PPAS, KUPA/PPAS, verifikasi RKA-SKPD, RKAP-SKPD, DPA-SKPD, DPPA-SKPD, penyusunan peraturan daerah APBD/perubahan APBD, peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD serta regulasi kebijakan APBD;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan, penyusunan dan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Anggaran, sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. melaksanakan persiapan petunjuk teknis penyusunan APBD, KUA/PPAS, KUPA/PPAS perubahan;
 - d. melaksanakan verifikasi RBA/RKA-SKPD dan PPKD, RBAP/RKAP-SKPD dan PPKD;
 - e. melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
 - f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. mendokumentasikan hasil perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - h. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Uraian tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran, sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan rancangan peraturan daerah APBD dan Perubahan APBD;
- e. melaksanakan verifikasi dan pembahasan RBA/RKA-SKPD dan PPKD, RBA/RKAP-SKPD dan PPKD Bersama TAPD;
- f. menyiapkan bahan Penyusunan Nota Keuangan APBD, Perubahan APBD, rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan perubahan penjabaran APBD;
- g. menyiapkan dan memfasilitasi kerjasama dengan instansi/bidang terkait penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- h. menyiapkan dan memfasilitasi kerjasama dengan instansi/bidang terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- i. menyiapkan dan memfasilitasi terkait dengan penyempurnaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bersama TAPD dan Badan Anggaran DPRD;
 - j. melaksanakan koordinasi terkait dengan persetujuan dan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD, BLUD dan PPKD;
 - k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - l. mendokumentasikan hasil penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - m. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
3. Sub Bidang Analisis Kebijakan, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Uraian tugas Sub Bidang Analisis Kebijakan, sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. menyiapkan dan memfasilitasi Kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan penyusunan regulasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. mendokumentasikan hasil penyusunan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Penyusunan analisis kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- i. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

c. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan pengelolaan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja, program dan anggaran kegiatan pengelolaan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai;
- c. pengkoordinasian kegiatan register Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan/register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) perangkat daerah, penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK), pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga, (TFK); dan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pengelolaan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan belanja daerah;

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan pengelolaan belanja daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan belanja daerah;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan belanja daerah;
- d. melaksanakan penatausahaan belanja daerah dan pemindah bukuan kas daerah;
- e. melaksanakan register Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas belanja perangkat daerah, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)dan daftar pengantar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)serta pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- g. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja daerah;
 - h. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
 - i. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - j. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pengelolaan belanja daerah;
 - k. menyiapkan dan memfasilitasi Kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan pengelolaan belanja daerah;
 - l. mendokumentasikan hasil pengelolaan belanja daerah;
 - m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan belanja daerah;
 - n. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan belanja daerah; dan
 - o. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengendalian anggaran;

Uraian tugas Sub Bidang Pengendalian Anggaran, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan pengendalian anggaran;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian anggaran;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian anggaran;
- d. melaksanakan pengelolaan dana transfer dan penatausahaan pembiayaan daerah;
- e. melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- f. melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah
- g. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan pengendalian anggaran;
- h. menyiapkan dan memfasilitasi Kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan pengendalian anggaran;
- i. mendokumentasikan hasil penyusunan pengendalian anggaran;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengendalian anggaran;
- k. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian anggaran;

- l. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
3. Sub Bidang Belanja Pegawai, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi belanja pegawai.
- Uraian tugas Sub Bidang Belanja Pegawai, sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan belanja pegawai;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis belanja pegawai;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan belanja pegawai;
 - d. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)Gaji dan Non Gaji
 - e. meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) serta melaksanakan proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
 - f. melaporkanrealisasi belanja Gaji dan Tunjangan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJKP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 - g. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan belanja pegawai;
 - h. menyiapkan dan memfasilitasi Kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan belanja pegawai;
 - i. mendokumentasikan hasil penyusunan belanja pegawai;
 - j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait belanja pegawai;
 - k. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan belanja pegawai; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan akuntansi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja, program dan anggaran dari akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan tanggapan/tindaklanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP-BPKRI) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan bulanan, triwulanan, semesteran, pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuaitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan –LO dan beban, pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan perangkat daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- d. penyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pelaporan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi akuntansi pendapatan;

Uraian tugas Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan akuntansi pendapatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi pendapatan;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan akuntansi pendapatan;
- d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan akuntansi pendapatan;
- e. menyusun tanggapan/tindaklanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- f. menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- g. menyiapkan dan memfasilitasi Kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan penyusunan akuntansi pendapatan;
 - h. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan akuntansi pendapatan;
 - i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Penyusunan akuntansi pendapatan;
 - j. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan akuntansi pendapatan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
2. Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Pembiayaan, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi akuntansi belanja dan pembiayaan.
- Uraian tugas Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Pembiayaan, sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan akuntansi belanja dan pembiayaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi belanja dan pembiayaan;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan akuntansi belanja dan pembiayaan;
 - d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan akuntansi belanja dan pembiayaan;
 - e. melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan –lo dan beban
 - f. mengkoordinasikan, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
 - g. membina akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan kabupaten banjar
 - h. menyiapkan dan memfasilitasi Kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan penyusunan akuntansi belanja dan pembiayaan;
 - i. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan akuntansi belanja dan pembiayaan;
 - j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Penyusunan akuntansi belanja dan pembiayaan;
 - k. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan akuntansi belanja dan pembiayaan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi evaluasi dan pelaporan;

Uraian tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan evaluasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi dan pelaporan;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- f. melaksanakan konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah
- g. membina Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten/Kota
- h. menyiapkan dan memfasilitasi Kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan evaluasi dan pelaporan;
- i. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait evaluasi dan pelaporan;
- k. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan program perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- c. pengkoordinasian kegiatan urusan perencanaan, dan pemanfaatan BMD, pengamanan, penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;

LKJIP BPKPAD KAB. BANJAR	18

- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah;

Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

 - a. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
 - b. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan perencanaan dan pemanfaatan BMD;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan BMD;
 - d. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan BMD;
 - e. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan perencanaan dan pemanfaatan BMD;
 - f. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah
 - g. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah
 - h. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah
 - i. menyiapkan dan memfasilitasi Kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan perencanaan dan pemanfaatan BMD;
 - j. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan BMD;
 - k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait perencanaan dan pemanfaatan BMD;
 - l. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan BMD;
 - m. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan;
2. Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengamanan dan penghapusan barang milik daerah;

Uraian tugas Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan pengamanan dan penghapusan BMD;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan dan penghapusan BMD;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan dan penghapusan BMD;
 - d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan pengamanan dan penghapusan BMD;
 - e. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah
 - f. meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah
 - g. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah
 - h. menyiapkan dan memfasilitasi Kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan pengamanan dan penghapusan BMD;
 - i. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan pengamanan dan penghapusan BMD;
 - j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengamanan dan penghapusan BMD;
 - k. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengamanan dan penghapusan BMD;
 - l. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
3. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penatausahaan barang milik daerah;

Uraian Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan penatausahaan BMD;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan BMD;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penatausahaan BMD;
- d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan BMD;
- e. melakukan inventarisasi terhadap BMD
- f. menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah pusat

- g. menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- h. menghimpun laporan persediaan barang milik daerah perangkat daerah;
- i. menyusun penetapan pejabat yang mengelola barang milik daerah
- j. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan penatausahaan BMD;
- k. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan penatausahaan BMD;
- l. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penatausahaan BMD;
- m. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan BMD;
- n. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

f. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan program pelayanan, pendataan, pendaftaran, validasi, penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan pelayanan, pendataan, pendaftaran, validasi, penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- c. pengkoordinasian kegiatan urusan pelayanan, pendataan, pendaftaran, validasi, penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pelayanan, pendataan, pendaftaran, validasi, penilaian dan penetapan objek pendapatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Pelayanan Pendapatan, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pelayanan pendapatan;

Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Pendapatan, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan pelayanan pendapatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pendapatan;

- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendapatan;
 - d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan pelayanan pendapatan;
 - e. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan pelayanan pendapatan;
 - f. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan pelayanan pendapatan;
 - g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan pendapatan;
 - h. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pendapatan;
 - i. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
2. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Validasi, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
- Uraian tugas Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Validasi, sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - e. melaksanakan urusan pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), serta penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan
 - f. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - g. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - i. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - j. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

3. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Objek Pendapatan, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penilaian dan penetapan objek pendapatan;

Uraian tugas Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Objek Pendapatan, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- e. mengkoordinasikan perumusan rencana pendapatan daerah dan evaluasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- f. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- g. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- i. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- j. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

.g. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan program perencanaan, pengembangan, penagihan, pemeriksaan, keberatan serta pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan perencanaan, pengembangan, penagihan, pemeriksaan, keberatan serta pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah;
- c. pengkoordinasian kegiatan urusan perencanaan, pengembangan, penagihan, pemeriksaan, keberatan serta pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah;

- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan, pengembangan, penagihan, pemeriksaan, keberatan serta pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perencanaan dan pengembangan;

Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan perencanaan dan pengembangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan dan pengembangan;
- d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan;
- e. menganalisis daftar wajib pajak serta kebijakan dan pengembangan pajak daerah
- f. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan pajak daerah dan pengelolaan
- g. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
- h. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan perencanaan dan pengembangan;
- i. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan perencanaan dan pengembangan;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait perencanaan dan pengembangan;
- k. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengembangan;
- l. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

- 2. Sub Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Keberatan, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penagihan, pemeriksaan dan keberatan;

Uraian tugas Sub Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Keberatan, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan penagihan, pemeriksaan dan keberatan;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data, monitoring pajak dan inventarisasi data tunggakan wajib pajak;
 - f. melaksanakan analisis terkait laporan keberatan wajib pajak;
 - g. mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengkata pajak;
 - h. memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberitahuan sangsi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang kewajiban pajak
 - i. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - j. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - l. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - m. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
3. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan data dan informasi.

Uraian tugas Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan pengelolaan data dan informasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- e. menyediakan sarana dan prasarana sitem informasi pajak daerah
- f. melaksanakan pengembangan, pengelolaan dan evaluasi terhadap sistem informasi pajak daerah
- g. mengolah, memelihara dan melaporkan basis data pendapatan daerah

- h. menghimpun dan menyerahkan laporan secara priodik data objek dan subjek pemungutan pajak serta pengembangannya
- i. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan pengelolaan data dan informasi;
- j. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan pengelolaan data dan informasi;
- k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan data dan informasi;
- l. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- m. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

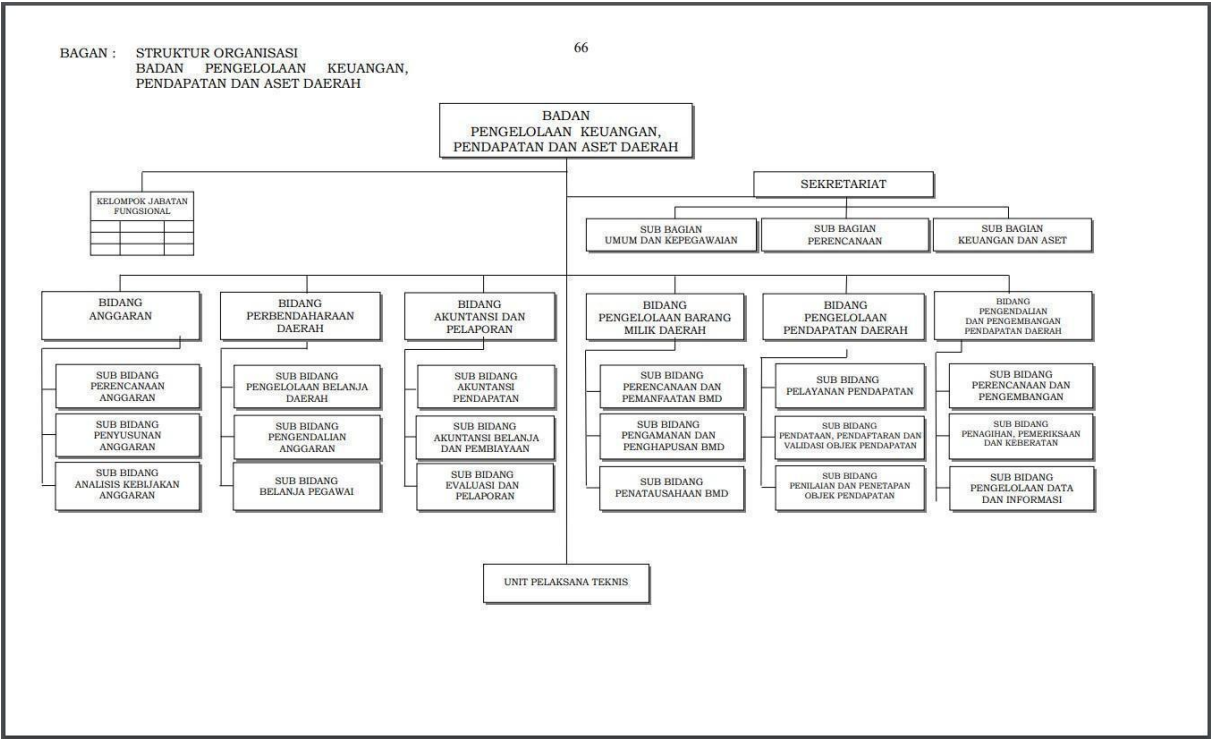
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

i. Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi BPKPAD

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi permasalahan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dilakukan melalui proses analisis pohon masalah kemudian diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah. Sehingga hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) dan disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama tahun 2021-2026, maka dapat diidentifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Sistem Pengelolaan Keuangan Belum Terintegrasi	Penentuan pagu anggaran masih berdasarkan <i>historical budget</i> belum <i>money follow function</i>
			Belanja tidak sesuai dengan penganggaran dan ketentuan yang ada
			Penyerapan belanja belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja yang diatur dalam anggaran kas
		Laporan keuangan berbasis akrual belum	Pemahaman pengelola keuangan di masing-

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		optimal	masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual belum memadai
		Belum dapat mewujudkan <i>good governance</i> dalam tata kelola Barang Milik Daerah	Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum tertib
			Sistem Informasi Aset belum optimal
			Sumber daya pengelola aset belum mendapat perhatian yang layak.
2.	Rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak masih rendah	Pengetahuan wajib pajak tentang aturan perpajakan dan mekanisme perhitungan pajak daerah masih terbatas
			Adanya potensi pajak daerah yang masih bisa digali
			Adanya wajib pajak yang belum taat membayar pajak sesuai ketentuan
		Data PBB yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada daerah tidak akurat	Data PBB belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			Masyarakat tidak mengetahui besaran pajak PBB yang terhutang
		Harga jual tanah transaksi BPHTB belum mengacu pada Zona Nilai Tanah (ZNT)	Tidak adanya lokasi yang mengacu pada zona nilai tanah
			Adanya penambahan wajib pajak BPHTB setiap tahun
		Komitmen dalam pencapaian target retribusi daerah belum terlaksana dengan baik	Masih adanya potensi retribusi daerah yang belum terdata oleh SKPD Pemungut
			Adanya perubahan kebijakan dan regulasi retribusi daerah
			Perlunya data penilaian dan penetapan target retribusi
		Data pendapatan daerah belum tersinkronisasi dengan baik	Kurang terbukanya data terkait pendapatan dari perusahaan daerah dan BUMD
			Perubahan data dan informasi terkait penyaluran dan serapan dana transfer tergantung keaktifan daerah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			Sumber data pendapatan daerah dipegang oleh beberapa instansi

Sumber : Dokumen Renstra 2021-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banjar

D. ISU STRATEGIS

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam urusan penunjang keuangan dan dalam peningkatan kapasitas keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan, bidang pengelolaan pendapatan dan bidang pengelolaan barang milik daerah oleh karenanya analisis, isu strategis merupakan langkah awal didalam pencapaian akuntabilitas keuangan dan asset daerah meningkatkan dan pencapaian optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*unresolved matters*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan

yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis BPKPAD adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu
- b. Belum tertatanya manajemen aset daerah
- c. Belum optimalnya peningkatan kapasitas keuangan daerah
- d. Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan , penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan
- e. Kurangnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antar perangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan desa dan kecamatan
- f. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan daerah

Aspek strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPKPAD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi BPKPAD dimasa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang. Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui :

- 1. Metode forum *Focussed Group Discussion (FGD)* dengan dihadiri oleh para stakeholder, dan atau SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Banjar.
- 2. Situasi, kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini.
- 3. Terdapatnya perubahan regulasi, baik terkait pengelolaan keuangan maupun aset daerah.
- 4. Isu-isu nasional terkait sasaran reformasi birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan, yaitu :
 - a. Mental aparatur dan manajemen perubahan
 - b. Pengawasan
 - c. Akuntabilitas

- d. Kelembagaan
- e. Tata laksana
- f. SDM ASN
- g. Peraturan perundang-undangan
- h. Pelayanan publik

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPAD Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023;

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2023 dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 beserta analisisnya;

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan saran;

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang - undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

BPKPAD mengampu tugas membantu kepala daerah dalam urusan penunjang keuangan. Berdasar urusan dan program yang diampu, BPKPAD mendukung pencapaian misi ke-4 Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD periode 2021–2026 yaitu : **“Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.”**Dengan 2 (dua) tujuan yaitu **(1)“Terselenggaranya reformasi dalam sistem penganggaran”**dengan indikator tujuan **“Nilai Opini BPK”**dengan sasaran **“Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat”** dengan indikator sasaran **“Indek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)”**.**(2) Terselenggaranya reformasi sumber-sumber pendapatan daerah”**dengan indikator tujuan **“Persentase**

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)”dengan sasaran “**Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**” dengan indikator sasaran “**Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**”.

“**Terselenggaranya reformasi dalam sistem penganggaran**”telah dapat memenuhi target indikator yaitu Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sesuai dengan predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Banjar secara berturut-turut selama 10 (sepuluh) tahun. Sasaran “**Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat**” dengan indikator sasaran “**Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)**”telah memenuhi target yaitu **96,02 %**. Nilai indeks tersebut sesuai dengan penilaian Tim Indeks Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Terselenggaranya reformasi sumber-sumber pendapatan daerah”telah dapat memenuhi target indikator “**Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)**” yaitu 4 %. Sasaran “**Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**” dengan indikator sasaran “**Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)** telah memenuhi target yaitu 30 %. Hasil tersebut didapat dari hasil rekapitulasi target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 dan 2023 data sampai dengan 31 Desember 2023.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) adalah suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilaikualitas kinerja tata kelola keuangan dan asset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKAD diukur melalui 4 (empat) dimensi meliputi: 5. Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik;	$IPKAD = (a + b + c + d) : 4$ <i>Keterangan :</i> <i>a = Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik</i> <i>b = Persentase perangkat daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak</i> <i>c = Persentase perangkat daerah dengan penyajian laporan keuangan dengan kategori baik</i>	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PEN DAPATAN DAN ASET DAERAH	Nilai IPKAD	ESSELON II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
			6. Persentase perangkat daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak; 7. Persentase perangkat daerah dengan penyajian laporan keuangan dengan kategori baik; dan 8. Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib.	<i>d = Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib</i>			
2	Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD.	Perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya;	$\frac{\text{realisasi tahun } n - \text{realisasi tahun } n-1}{\text{realisasi tahun } n-1} \times 100 \%$	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RPJMD	ESSELON II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
			Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.				

Sumber : Surat Keputusan IKU BPKPAD TA. 2023

A. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan untuk tahun 2023 meliputi (1) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui (1) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang melalui (pohon kinerja) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	94.34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	%	74	50.073.541.802	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
				Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik	%	88.88	232.822.808.900	
					Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik	%	98,14		
					Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	%	85.18		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib	%	87.03	540.730.450	
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	4	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian pendapatan asli daerah (PAD)	%	95	2.090.361.517	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Terselenggara urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan,	Persentase Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Badan pengelolaan Keuangan,	%	74	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan indeks kepatuhan dan kinerja intern	%	74	50.073.541.802	Sekretaris

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umum dan Kepegawaian (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	Pendapatan dan Aset Daerah			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	%	100		Sekretaris
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100		Sekretaris
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100		Sekretaris

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100		Sekretaris
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100		Sekretaris
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100		Sekretaris

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100		Sekretaris
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	%	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	9	56.098.100	Kasubbag Perencanaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	44.018.680.794	Kasubbag Perencanaan
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	14.966.260	Kasubbag Perencanaan
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	1.552.758.380	Kasubbag Perencanaan
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	1.156.462.000	Kasubbag Perencanaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				SKPD					
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	3	2.038.804.518	Kasubbag Perencanaan
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	19	1.235.771.750	Kasubbag Perencanaan
Terhimpunnya perencanaan perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen	3						Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terkumpulnya Penganggaran perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen	1						
Terhimpunnya Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen	8						
Terhimpunnya perencanaan perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen	1						Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terkumpulnya Penganggaran perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen	2						
Terhimpunnya Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen	9						
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Orang/ Bulan	75	43.574.654.994	Kasubbag Keuangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	419.298.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	15.780.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	18	8.947.800	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.507.900	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	3.024.600	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	Laporan	1	9.433.760	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya dalam membantu membuat SPP	Jumlah berkas dalam penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12						Pembantu Bendahara Pengeluaran
Terhimpunnya pengambilan SPM yang dibuat PPK untuk disampaikan ke BUD agar diterbitkan SP2D	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12						
Terfasilitasinya membayar dan mencatat setiap transaksi keuangan	Jumlah berkas dalam terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
sesuai dengan belanja kegiatan									
Terhimpunnya dan menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari nota permintaan dana	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12						
Terhimpunnya dalam membantu membuat laporan keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	16						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya dalam membantu laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12						
Terhimpunnya dalam Membuat SKP	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	1						
Terhimpunnya dalam Membantu kelengkapan dan penyusunan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SPJ									
Terhimpunnya Mengerjakan tugas lain sesuai bidang dan tanggung jawab	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	5						
Terhimpunnya pengumpulan kelengkapan BTT	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12						
Terhimpunnya penyiapan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran	Jumlah laporan terlaksananya penyiapan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	1						Pengurus Barang Pengguna

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
barang milik daerah									
Terhimpunnya pencatatan dan inventarisasi barang milik SKPD	Persentase dokumen terlaksananya pencatatan dan inventarisasi barang milik SKPD	%	100						
Terhimpunnya pengamanan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang	Jumlah dokumen terlaksananya pengamanan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang	Bulan	12						
Terhimpunnya dokumen pengajuan usulan pemusnahan	Jumlah laporan terlaksananya dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan	Dokumen	1						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dan penghapusan barang SKPD	barang SKPD								
Terhimpunnya penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan dan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang	Jumlah dokumen terlaksananya penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan dan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang	Dokumen	4						
Terhimpunnya penyerahan barang berdasarkan surat perintah penyaluran	Jumlah kegiatan terlaksananya penyerahan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) yang	%	100						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang	dituangkan dalam berita acara penyerahan barang								
Terhimpunnya pembuatan kartu inventaris ruangan (KIR) semesteran dan tahunan	Jumlah kegiatan terlaksananya pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan	Bulan	12						
Terhimpunnya pemberian label pada barang milik daerah dan melakukan stock opname barang milik daerah	Jumlah kegiatan terlaksananya pemberian label pada barang milik daerah dan melakukan stock opname barang milik daerah	Dokumen	1						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjawaban	Jumlah laporan terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjawaban	%	100						
Terhimpunnya membantu membuat SPP, GU, TU dan LS	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12						Bendahara Pengeluaran
Terhimpunnya mengantar/mengambil SPM yang dibuat PPK untuk disampaikan ke BUD agar diterbitkan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP2D dan menyampaikan ke Bank Kalsel untuk pemindahbukuan									
Terhimpunnya membayar dan mencatat setiap transaksi keuangan sesuai dengan belanja kegiatan untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12						
Terhimpunnya dan menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	12						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
lainnya dari nota permintaan dana yang diajukan oleh masing-masing bidang									
Terhimpunnya dalam membuat laporan keuangan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	16						
Terhimpunnya laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	12						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya dalam membuat SKPD	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	1						
Terhimpunnya dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	10						
Terhimpunnya dalam membantu membuat SPP	Jumlah berkas dalam penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12						Pembantu Bendahara Pengeluaran
Terhimpunnya pengambilan SPM yang dibuat PPK untuk disampaikan ke BUD agar	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
diterbitkan SP2D									
Terfasilitasinya membayar dan mencatat setiap transaksi keuangan sesuai dengan belanja kegiatan	Jumlah berkas dalam terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12						
Terhimpunnya dan menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari nota permintaan dana	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya dalam membantu membuat laporan keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	16						
Terhimpunnya dalam membantu laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12						
Terhimpunnya dalam Membuat SKP	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	1						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya dalam Membantu kelengkapan dan penyusunan SPJ	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12						
Terhimpunnya Mengerjakan tugas lain sesuai bidang dan tanggung jawab	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	5						
Terhimpunnya dalam membuat Rencana Kerja Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	27						Pembantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya dalam membantu membuat SPP dan SPM Gaji dan Tunjangan PNS	Terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	27						
Terhimpunnya dalam membantu membuat Rencana Kerja Pembayaran Gaji dan Insentif PTT	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	13						
Terhimpunnya dalam menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari pembayaran	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	27						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya dalam menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari pembayaran gaji dan insentif PTT	Terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	13						
Terhimpunnya dalam membuat SKP	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	1						
Terfasilitasiny a tugas lain sesuai bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	5						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya dalam proses dan mengadministra si setoran penerimaan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Tanda Bukti Pembayaran	Transaksi	70						Bendahara Penerimaan
Terhimpunnya proses setoran penerimaan tunai ke Bank Kalsel	Tersedianya catatan Register STS Tunai	Transaksi	70						
Terkumpulnya bahan/data untuk kelengkapan	Tersedianya catatan STS Transfer	Transaksi	2000						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dan penyusunan STS Transfer									
Terhimpunnya dalam administrasi penerimaan transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Register STS Transfer	Transaksi	2000						
Terhimpunnya laporan penerimaan harian	Jumlah laporan yang tersedia	Laporan	200						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Jumlah laporan yang tersedia	Laporan	18						
Terkumpulnya dalam mengerjakan tugas lain sesuai dengan bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya pendukung administrasi	Kegiatan	1						
Terhimpunnya dalam proses dan mengadministrasi setoran penerimaan tunai sesuai	Tersedianya catatan Tanda Bukti Pembayaran	Transaksi	70						Pembantu Bendahara Penerimaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dengan ketentuan yang berlaku									
Terhimpunnya proses setoran penerimaan tunai ke Bank KalSel	Tersedianya catatan Register STS Tunai	Transaksi	70						
Terkumpulnya bahan/data untuk kelengkapan dan penyusunan STS Transfer	Tersedianya catatan STS Transfer	Transaksi	2000						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya dalam mengadministra si setoran penerimaan transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Register STS Transfer	Transaksi	2000						
Terhimpunnya laporan penerimaan harian	Jumlah laporan yang tersedia	Laporan	200						
Terhimpunnya laporan bulanan, triwulan, semesteran,	Jumlah laporan yang tersedia	Laporan	18						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dan tahunan									
Terkumpulnya dalam mengerjakan tugas lain sesuai dengan bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya pendukung administrasi	Kegiatan	1						
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan	%	100	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	27.601.500	Kasubbag Umpeg

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dengan ketentuan	ketentuan			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	33.316.500	
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	87.271.740	
				Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	57.110.100	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.347.458.540	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	49	Unit	37.798.000	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13	Unit	1.118.664.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	395.154.518	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan	1.643.650.00	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1.235.771.750	
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan daerah yang tertib dan baik	%	88.88	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertib dan baik	%	100	1.360.373.000	Kepala Bidang Anggaran
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Anggaran	Persentase tersusunnya rancangan peraturan daerah (RAPERDA) anggaran pendapatan dan	%	100						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan baik	belanja daerah (APBD) tepat waktu								
Tersusunnya Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Dok	2	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Dok	2	70.000.000	Kasubbid Perencanaan Anggaran
Tersusunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Jumlah Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang Disusun	Dok	2	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang Disusun	Dok	2	70.000.000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(PPAS)									
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dok	2	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dok	2	370.759.300	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Dok	96	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Dok	96	231.474.500	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya data penyusunan dokumen kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Persentase data penyusunan dokumen kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terhimpun	%	100						Analisis Perencanaan Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dok	3	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Dok	3	323.139.200	Kasubid Penyusunan Anggaran
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dok	3	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dok	3	229.100.000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dok	3	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dok	3	65.900.000	Kasubid Analisis Kebijakan Anggaran
Tersusunnya bahan Regulasi kebijakan bidang anggaran	Persentase bahan yang akan dijadikan Regulasi serta kebijakan bidang anggaran	%	100						Analisis Perencanaan Anggaran
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase perangkat daerah dengan penyerapan belanja daerah yang baik	%	98.14	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	%	100	222.890.936.500	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah
Meningkatnya penyaluran belanja daerah yang tertib dan	Persentase penyelesaian surat penyediaan dana (SPD), surat Persetujuan	%	100						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
baik	Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu								
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah (sasaran kegiatan ini)	Terselesaikannya SPP SPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	%	94.20	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah DokumenHasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Orang	47	69.999.800	
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan	Orang	47	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	47	126.920.700	Kasubid Pengelolaan Belanja Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota								
Terhimpunnya dokumen laporan pertanggungjawaban fungsional dan Penerbitan SP2D UP, GU, TU, LS	Menyiapkan cek list bahan pengujian atas kebenaran penagihan UP, GU, TU, LS dalam rangka penerbitan SP2D	Dok	400						Pengolah Data Belanja Langsung
	Membuat penomoran register SP2D UP, GU, TU, LS, register penolakan SP2D, tanda terima SP2D	Buku	5						
	Menyiapkan dan mengetik penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Dok	350						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mengumpulkan bahan pengujian atas laporan pertanggungjawaban uang persediaan (LPJ-UP) bendahara pengeluaran setiap pengajuan GU/TU persediaan	Dok	200						
	Mengumpulkan laporan pertanggungjawaban fungsional yang disampaikan oleh bendahara SKPD yang diserahkan paling lambat tanggal 10 per bulan	Dok	150						
Terfasilitasinya perencanaan realisasi kegiatan fisik/keuangan	Jumlah dokumen Terlaksananya administrasi perencanaan realisasi kegiatan fisik/keuangan serta	Dok	12						Pranata Komputer Ahli Pertama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
serta pengadaan barang dan jasa	pengadaan barang dan jasa								
Terfasilitasinya penghimpunan data rencana program/kegiatan BPKPAD	Jumlah dokumen Terlaksananya penghimpunan data rencana program/kegiatan BPKPAD	Dok	5						
Terfasilitasinya pendistribusian formulir sesuai jadwal untuk kelancaran pengumpulan data	Jumlah dokumen Terlaksananya pendistribusian formulir sesuai jadwal untuk kelancaran pengumpulan data	Dok	5						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya entry data untuk program/kegiatan	Jumlah dokumen Terlaksananya entry data untuk program/kegiatan	Dok	2						
Terfasilitasinya pengumpulan data/bahan pembuatan dokumen	Jumlah dokumen Terlaksananya pengumpulan data/bahan pembuatan dokumen	Dok	5						
Terfasilitasinya peremajaan data dan informasi	Jumlah dokumen Terlaksananya peremajaan data dan informasi	Dok	4						
Terfasilitasinya pengarsipan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen Terlaksananya pengarsipan dokumen perencanaan	Dok	10						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabannya	Jumlah Terlaksananya tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya	Kali	10						
Terlaksananya Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dok	376	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dok	376	140.595.500	Kasubid Penilaian dan Penetapan
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Dok	277	Koordinasi, fasilitas, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dok	277	222.595.762.500	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Lainnya								
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Lap	100	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Lap	100	8.000.000.000	
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen kelengkapan pencairan Dana Desa	Dok	400						Pengelola Data Keuangan Daerah
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen dalam menginput Aplikasi Online Monitoring (SPAN) dari KPPN untuk Penyaluran Dana Desa	Dok	450						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen dalam mengarsipkan kelengkapan berkas permintaan penyaluran Dana Desa	Dok	430						
Terfasilitasinya Belanja Tidak Tetap di setiap SKPD	Jumlah dokumen dalam mengecek kelengkapan Bahan Belanja Tidak Tetap (BTT)	Dok	5						
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen dalam menginput Dana Desa	Dok	400						
Terfasilitasinya Belanja Tidak Tetap di setiap SKPD	Jumlah dokumen dalam menginput BTT (Bahan Belanja Tidak Tetap)	Dok	400						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya tugas-tugas lain sesuai dengan tupoksi	Jumlah dokumen dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan	Dok	12						
Terhimpunnya Surat Persediaan Dana di setiap SKPD	Jumlah dokumen Menginput SPD	Dok	56						Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
Terfasilitasinya Penyaluran BTT	Jumlah dokumen Menginput dan merekap BTT	Dok	12						
Terfasilitasinya Penyaluran BTT	Jumlah dokumen dalam Membantu Mengecek Kelengkapan bahan Belanja Tidak Tetap (BTT)	Dok	20						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen Menginput Aplikasi Online Monitoring (SPAN) dari KPPN untuk penyaluran Dana Desa	Dok	277						
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan	Lap	72	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Lap	72	27.657.800	Kasubid Belanja Pegawai

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fihak Ketiga (PFK)	Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dok	55	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dok	55	69.999.800	
Terhimpunnya dokumen Penerbitan Daftar Gaji,	Mengumpulkan bahan untuk perubahan berkala, Pangkat PNS SKPD dan Kecamatan	Dok	275						Pengadministrasi Umum

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SKPP, SSBP, SSP, SP2D Belanja Tidak Langsung	Mengetik Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPD) yang terdiri dari Pensiun, Janda, Duda, Pindah	Dok	110						
	Menyiapkan SP2D Tunjangan Daerah PNS Kabupaten Banjar	Dok	300						
	Mencetak Daftar Gaji setiap Bulannya	Daftar	100						
	Menyiapkan SP2D Gaji PNS Kabupaten Banjar	Dok	300						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mendokumentasikan SP2D Gaji dan Tunjangan Daerah	Dok	70						
	Menyiapkan bahan untuk memindahkan pegawai (mutasi) antar Kabupaten /Kota, provinsi dan antar SKPD	Dok	350						
	Mengolah data aplikasi SimGaji yang Pensiun, Pindah dan meninggal dunia Januari s.d Desember 2023	Dok	100						
	Mengolah daftar Gaji terusan setiap bulannya	Dok	100						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	%	85.18	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	%	100	501.499.600	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan baik	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	%	100						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dok	2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dok	2	194.155.000	Kasubid Akuntansi Pendapatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya data penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dok	2						Penyusun Laporan Keuangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lap	18						
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lap	18	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lap	18	72.759.700	Kasubid Akuntansi Belanja dan Pembiayaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dok	1	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dok	1	73.235.300	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Lap	2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Lap	2	161.349.600	
Terhimpunnya data penyusunan	Tersedianya data penyusunan kebijakan dan	Dok	1						Penyusun Laporan Keuangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah								
Terhimpunnya data konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah	Tersedianya jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Dok	2						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Daerah									
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib	%	87.03	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	%	94	540.730.450	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	%	94						
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dok	1	Penyusunan standar harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dok	1	75.693.000	Kasubid Perencanaan dan Pemanfaatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dok	1	Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dok	1	58.314.500	BMD
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Lap	1	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Lap	1	56.268.000	
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	Jumlah Dokumen Hasil Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok	10	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok	10	65.259.950	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Daerah									
Terfasilitasinya penatausahaan RKBMD dan RKBMD di kabupaten Banjar	Jumlah dokumen Terekapnya laporan RKBMD dan RKPBM SKPD	SKPD	24						Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
Terfasilitasinya data Pemanfaatan Barang daerah	Jumlah Kegiatan data pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Banjar yang bisa disajikan	Keg	3						
Terfasilitasinya penatausahaan pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Dok	5						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya data BMD yang dimanfaatkan	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Dok	1						
Terfasilitasinya daftar jaga Kerjasama Pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen daftar jaga Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan BMD	Dok	1						
Terfasilitasinya data dokumen untuk penilaian	Jumlah berkas data dan dokumen BMD yang akan diusulkan penilaian	Dok	1						
Terfasilitasinya Penilaian BMD	Jumlah daftar hasil penilaian BMD	Dok	1						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya penatausahaan RKBMD dan RKBMD di kabupaten Banjar	Jumlah dokumen Terekapnya laporan RKBMD dan RKPBM SKPD	SKPD	23						Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
Terfasilitasinya data Pemanfaatan Barang daerah	Jumlah Kegiatan data pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Banjar yang bisa disajikan	Keg	2						
Terfasilitasinya penatausahaan pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Dok	5						
Terfasilitasinya data BMD yang dimanfaatkan	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Dok	1						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya daftar jaga Kerjasama Pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen daftar jaga Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan BMD	Dok	1						
Terfasilitasinya Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Terhimpunnya Usulan terkait Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Banjar	Dok	1						
Terfasilitasinya data dokumen untuk penilaian	Jumlah berkas data dan dokumen BMD yang akan diusulkan penilaian	Dok	1						
Terfasilitasinya Penilaian BMD	Jumlah daftar hasil penilaian BMD	Dok	1						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Lap	1	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Lap	1	54.867.000	Kasubid Pengamanan dan Penghapusan BMD
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok	15	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok	15	65.259.950	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lap	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lap	1	200.977.000	Kasubid Penatausahaan BMD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Lap	1	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Lap	1	29.351.000	
Terfasilitasinya penatausahaan Inventarisasi di setiap SKPD	Mengumpulkan dan merekap laporan inventaris SKPD	Lap	13						Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
Terfasilitasinya rekonsiliasi data aset SKPD dengan neraca akuntansi	Merekonsiliasi data aset SKPD dengan data akuntansi	Lap	4						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya pengolahan data laporan inventaris semesteran kabupaten	Mengolah dan menyimpan data dokumen barang milik daerah	Lap	2						
Terfasilitasinya penatausahaan penetapan status penggunaan BMD tahunan Kabupaten	Mengumpulkan dan merekap usul penetapan status penggunaan BMD	Lap	1						
Terfasilitasinya inventarisasi BMD di Kabupaten	Membantu melakukan inventarisasi/sensus BMD	Lap	1						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya rekonsiliasi BMD di setiap SKPD di Kabupaten	Menyiapkan bahan rekonsiliasi BMD SKPD	Lap	47						
Terlaksananya laporan inventaris tahunan	Mengolah data laporan inventaris tahunan kabupaten	Lap	47						
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Simda BMD dan pemeriksaan perangkat yang digunakan dalam pengelolaan barang milik daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah dan pemeriksaan perangkat yang digunakan	Lap	12						Pranata Komputer Terampil

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan	Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Lap	4						
Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten	Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten	Lap	4						
Terlaksananya penyusunan Laporan Unaudited barang milik daerah Kabupaten Tahun 2021	Jumlah Laporan Unaudited Kabupaten tahun 2021	Lap	1						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya penyusunan laporan audited barang milik daerah Kabupaten Tahun 2021	Jumlah Laporan audited Kabupaten tahun 2021	Lap	1						
Terlaksananya pengumpulan data laporan barang milik daerah dari perangkat daerah	Jumlah terhimpunnya data laporan barang milik daerah perangkat daerah se Kabupaten	Lap SKPD	47						
Terlaksananya peningkatan pajak dan retribusi daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	%	4	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bidang Pengendalian Pendapatan)	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	%	4	1.315.080.417	a Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dok	2	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dok	2	201.902.000	Kasubid Perencanaan dan Pengembangan
Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dok	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dok	2	110.482.000	
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Lap	2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Lap	2	15.146.500	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Lap	4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Lap	4	10.136.000	
Terhimpunnya data penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Data Penyusunan Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhimpun	%	100						Pengadministrasi Pajak
Terhimpunnya data penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan	Persentase data penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan dan	%	100						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang terhimpun								
Terhimpunnya data penyusunan dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Persentase data penyusunan dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah yang terhimpun	%	100						Analisis Pendapatan Daerah
Terhimpunnya data penyusunan dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Persentase data penyusunan dokumen rencana pengelolaan pajak daerah yang terhimpun	%	100						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dok	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dok	11	718.438.000	Kasubid Penagihan Pemeriksaan dan Keberatan
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dok	1	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dok	1	6.750.500	
Terlaksannannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dok	2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dok	2	157.339.017	
Terhimpunnya Penagihan Pajak Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	%	100						Pengadministrasi Pajak

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya Data Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Data Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah yang terhimpun	%	100						Analisis Penagihan Pajak
Terhimpunnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase tersusunnya dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	%	100						Pengadministrasi Pajak

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya data penyusunan dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Persentase data penyusunan dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah yang terhimpun	%	100						Analisis Pajak dan Retribusi Daerah
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Lap	4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Lap	4	16.097.500	Kasubid Pengelolaan Data dan Informasi
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Data yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dok	16	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Data yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dok	16	28.098.900	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Sarana dan Prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	1	50.690.000	
Terhimpunnya data pelaporan pajak daerah yang telah di verifikasi	Persentase Data pelaporan pajak daerah yang telah terhimpun dan diverifikasi	%	100						Analisis Pendapatan Daerah
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Jumlah Plang Parkir yang terpasang	%	100						
Terhimpunnya data penyusunan laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis data pajak daerah yang	Persentase Data Penyusunan Laporan Hasil Pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis data pajak daerah yang	%	100						Analisis Pendapatan Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	terhimpun								
Terlaksananya peningkatan Wajib Pajak Daerah yang patuh	Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	%	70	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bidang Pengelolaan Pendapatan)	Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	%	70	775.281.100	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (11 jenis layanan pajak daerah)	Layanan	11	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (11 jenis layanan pajak daerah)	Layanan	11	73.645.100	Kasubid Pelayanan Pendapatan
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar	Laporan	10	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar	Laporan	10	672.448.500	Kasubid Pendataan, Pendaftaran dan Validasi Objek Pendapatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyuluhan data objek dan subjek pajak PBB-P2	%	100						Analisis Pajak dan Retribusi Daerah
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyusunan data objek dan subjek pajak BPHTB	%	100						Analisis Pajak dan Retribusi Daerah
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyusunan data objek dan subjek pajak Air Tanah, Hiburan dan Sarang Burung Walet	%	100						Analisis Pajak dan Retribusi Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyusunan objek dan subjek pajak Hotel, Restoran, Parkir, Reklame dan MBLB	%	100						Analisis Pajak dan Retribusi Daerah
Terlaksananya kegiatan pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWPD), serta penerbitan NPWPD secara Perjabatan	Tersusunnya laporan penerbitan Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWPD) yang sesuai tepat waktu	Lap	10						Analisis Pajak dan Retribusi Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	WP	8300	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	WP	8300	22.530.500	Kasubid Penilaian dan Penetapan Objek Pendapatan
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame)	Dok	3	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame)	Dok	3	6.657.000	
Terhimpunnya objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Persentase Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	%	100						Analisis Pajak dan Retribusi Daerah

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar 2023

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2023

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- ☐ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- ☐ Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja (BPKPAD) Kab. Banjar tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Perangkat Kinerja

N o	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Orange
4	51% ≤ 65%	Rendah	Kuning
5	< 50%	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPKPAD Kab Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKPAD Kab. Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut:

LKJIP BPKPAD KAB. BANJAR	100

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARG ET	REALISA SI	CAPAIAN (%)	PREDIK AT
1	2	3	4	5	6	7	8

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	IPKAD = (a + b + c + d) : 4 Keterangan : a = Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik; b = Persentase perangkat daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak; c = Persentase perangkat daerah dengan penyajian laporan keuangan dengan kategori baik; d = Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib.	%	94.34	96,02	101,78 %	Sangat Tinggi
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{(\text{realisasi tahun n} - \text{realisasi tahun n-1})}{\text{realisasi tahun n-1}} \times 100\%$	%	4	30	750%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Daerah							
Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Peningkatan indeks kepatuhan dan kinerja intern	$\Sigma (\text{unsur kinerja utama} \times 40\%) + (\text{unsur kepatuhan} \times 30\%) + (\text{unsur pelayanan umum} \times 30\%)$ Penilaian Mandiri Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern BPKPAD Kabupaten Banjar merupakan salah satu instrument untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan sistem pengendalian intern pada BPKPAD Kabupaten Banjar	indeks	74	97.16	131.29 %	Sangat Tinggi
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan / Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang ditargetkan x 100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya perencanaan perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen	3	3	100%	Sangat Tinggi
Terkumpulnya Penganggaran perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen	1	1	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen	8	8	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya perencanaan perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terkumpulnya Penganggaran perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Laporan	2	2	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen	9	9	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang ditargetkan x 100%	%	100	91	91%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang ditargetkan x 100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dalam membantu membuat SPP	Jumlah berkas dalam penyediaan administrasi keuangan	Jumlah berkas dalam penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya pengambilan SPM yang dibuat PPK untuk disampaikan ke BUD agar diterbitkan SP2D	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12	12	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya membayar dan mencatat setiap transaksi keuangan sesuai dengan belanja kegiatan	Jumlah berkas dalam terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Jumlah berkas dalam terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	2	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dan menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari nota permintaan dana	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12	12	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya dalam membantu membuat laporan keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	16	16	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dalam membantu laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dalam Membuat SKP	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dalam Membantu kelengkapan dan penyusunan SPJ	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya Mengerjakan tugas lain sesuai bidang dan tanggung jawab	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	5	5	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya pengumpulan kelengkapan BTT	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya penyiapan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah	Jumlah laporan terlaksananya penyiapan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah laporan terlaksananya penyiapan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya pencatatan dan inventarisasi barang milik SKPD	Persentase dokumen terlaksananya pencatatan dan inventarisasi barang milik SKPD	Persentase dokumen terlaksananya pencatatan dan inventarisasi barang milik SKPD / Persentase dokumen terlaksananya pencatatan dan inventarisasi barang milik SKPD yang ditargetkan x 100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya pengamanan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang	Jumlah dokumen terlaksananya pengamanan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang	Jumlah dokumen terlaksananya pengamanan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang	Bulan	12	12	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang SKPD	Jumlah laporan terlaksananya dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang SKPD	Jumlah laporan terlaksananya dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang SKPD	Dokumen	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan dan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang	Jumlah dokumen terlaksananya penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan dan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang	Jumlah dokumen terlaksananya penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan dan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang	Dokumen	4	4	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya penyerahan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang	Jumlah kegiatan terlaksananya penyerahan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang	Jumlah kegiatan terlaksananya penyerahan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya pembuatan kartu inventaris ruangan (KIR) semesteran dan tahunan	Jumlah kegiatan terlaksananya pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan	Jumlah kegiatan terlaksananya pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan	Bulan	12	12	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya pemberian label pada barang milik daerah dan melakukan stock opname barang milik daerah	Jumlah kegiatan terlaksananya pemberian label pada barang milik daerah dan melakukan stock opname barang milik daerah	Jumlah kegiatan terlaksananya pemberian label pada barang milik daerah dan melakukan stock opname barang milik daerah	Dokumen	1	1	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjawaban	Jumlah laporan terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjawaban	Jumlah laporan terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjawaban / Jumlah laporan terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjawaban x 100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya membantu membuat SPP, GU, TU dan LS	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya mengantar/mengambil SPM yang dibuat PPK untuk disampaikan ke BUD agar diterbitkan SP2D dan menyampaikan ke Bank Kalsel untuk	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12	12	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
pemindahbukuan							
Terhimpunnya membayar dan mencatat setiap transaksi keuangan sesuai dengan belanja kegiatan untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12	12	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dan menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari nota permintaan dana yang diajukan oleh masing-masing bidang	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya dalam membuat laporan keuangan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	16	16	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dalam membuat SKPD	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	10	10	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya dalam membantu membuat SPP	Jumlah berkas dalam penyediaan administrasi keuangan	Jumlah berkas dalam penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya pengambilan SPM yang dibuat PPK untuk disampaikan ke BUD agar diterbitkan SP2D	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12	12	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasnya membayar dan mencatat setiap transaksi keuangan sesuai dengan belanja kegiatan	Jumlah berkas dalam terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Jumlah berkas dalam terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya dan menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari nota permintaan dana	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12	12	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dalam membantu membuat laporan keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	16	16	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dalam membantu laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya dalam Membuat SKP	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dalam Membantu kelengkapan dan penyusunan SPJ	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya Mengerjakan tugas lain sesuai bidang dan tanggung jawab	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	5	5	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dalam membuat Rencana Kerja Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Jumlah penyediaan administrasi keuangan	Berkas	27	27	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terfasilitasinya dalam membantu membuat SPP dan SPM Gaji dan Tunjangan PNS	Terlaksananya pendukung administrasi	Jumlah pendukung administrasi	Berkas	27	27	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dalam membantu membuat Rencana Kerja Pembayaran Gaji dan Insentif PTT	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Jumlah pendukung administrasi keuangan	Berkas	13	13	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dalam menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari pembayaran	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Jumlah pendukung administrasi keuangan	Berkas	27	27	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dalam menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari	Terlaksananya pendukung administrasi	Jumlah pendukung administrasi	Berkas	13	13	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
pembayaran gaji dan insentif PTT							
Terhimpunnya dalam membuat SKP	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Jumlah pendukung administrasi keuangan	Berkas	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya tugas lain sesuai bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Jumlah pendukung administrasi keuangan	Berkas	5	5	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dalam proses dan mengadministrasi setoran penerimaan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Tanda Bukti Pembayaran	Jumlah catatan Tanda Bukti Pembayaran	Transaksi	70	70	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya proses setoran penerimaan tunai ke Bank KalSel	Tersedianya catatan Register STS Tunai	Jumlah catatan Register STS Tunai	Transaksi	2000	2000	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dalam mengadministrasi setoran penerimaan transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Register STS Transfer	Jumlah catatan Register STS Transfer	Transaksi	2000	2000	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya laporan penerimaan harian	Jumlah laporan yang tersedia	Jumlah laporan yang tersedia	Laporan	200	200	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Jumlah laporan yang tersedia	Jumlah laporan yang tersedia	Laporan	18	18	100%	Sangat Tinggi
Terkumpulnya dalam mengerjakan tugas lain sesuai dengan bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya pendukung administrasi	Jumlah pendukung administrasi	Kegiatan	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dalam proses dan mengadministrasi setoran penerimaan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Tanda Bukti Pembayaran	Jumlah catatan Tanda Bukti Pembayaran	Transaksi	70	70	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya proses setoran penerimaan tunai ke Bank KalSel	Tersedianya catatan Register STS Tunai	Jumlah catatan Register STS Tunai	Transaksi	70	70	100%	Sangat Tinggi
Terkumpulnya bahan/data untuk kelengkapan dan penyusunan STS Transfer	Tersedianya catatan STS Transfer	Jumlah catatan STS Transfer	Transaksi	2000	2000	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dalam administrasi setoran penerimaan transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Register STS Transfer	Jumlah catatan Register STS Transfer	Transaksi	2000	2000	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya laporan penerimaan harian	Jumlah laporan yang tersedia	Jumlah laporan yang tersedia	Laporan	200	200	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Jumlah laporan yang tersedia	Jumlah laporan yang tersedia	Laporan	18	18	100%	Sangat Tinggi
Terkumpulnya dalam mengerjakan tugas lain sesuai dengan bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya pendukung administrasi	Jumlah pendukung administrasi	Kegiatan	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dalam proses dan mengadministrasi setoran penerimaan	Tersedianya catatan Tanda Bukti Pembayaran	Jumlah catatan Tanda Bukti Pembayaran	Transaksi	70	70	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku							
Terhimpunnya proses setoran penerimaan tunai ke Bank KalSel	Tersedianya catatan Register STS Tunai	Jumlah catatan Register STS Tunai	Transaksi	70	70	100%	Sangat Tinggi
Terkumpulnya bahan/data untuk kelengkapan dan penyusunan STS Transfer	Tersedianya catatan STS Transfer	Jumlah catatan STS Transfer	Transaksi	2000	2000	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya dalam mengadministrasi setoran penerimaan transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Register STS Transfer	Jumlah catatan Register STS Transfer	Transaksi	2000	2000	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya laporan penerimaan harian	Jumlah laporan yang tersedia	Jumlah laporan yang tersedia	Laporan	200	200	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Jumlah laporan yang tersedia	Jumlah laporan yang tersedia	Laporan	18	18	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terkumpulnya dalam mengerjakan tugas lain sesuai dengan bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya pendukung administrasi	Jumlah pendukung administrasi	Kegiatan	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan yang di targetkan x 100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan yang di targetkan x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan yang di targetkan x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan yang di targetkan x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan daerah yang tertib dan baik	Jumlah perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik / Jumlah seluruh perangkat daerah yang ada di kabupaten Banjar x 100 %	%	88.88	90	101.26%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan baik	Persentase tersusunnya rancangan peraturan daerah (RAPERDA) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tepat waktu	Jumlah Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penunjangnya / Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penunjangnya sesuai ketentuan X 100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Jumlah Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang Disusun	Dok	2	2	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersusunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang Disusun	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Jumlah Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang Disusun	Dok	2	2	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dok	2	2	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Dok	96	96	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Anggaran Belanja Daerah Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD							
Terhimpunnya data penyusunan dokumen kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Persentase data penyusunan dokumen kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terhimpun	Jumlah data penyusunan dokumen kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terhimpun	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dok	3	3	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Penjabaran APBD							
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dok	3	3	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	umlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dok	3	3	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya bahan Regulasi kebijakan bidang anggaran	Persentase bahan yang akan dijadikan Regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah bahan yang akan dijadikan Regulasi serta kebijakan bidang anggaran / Jumlah bahan yang akan dijadikan Regulasi serta kebijakan bidang anggaran	%	100	100	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
		yang di targetkan x100%					
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase perangkat daerah dengan penyerapan belanja daerah yang baik	Jumlah perangkat daerah dengan penyerapan belanja daerah yang baik / Jumlah seluruh perangkat daerah yang ada di kabupaten Banjar x 100 %	%	98.14	90.29	92%	Sangat Tinggi
Meningkatnya penyaluran belanja daerah yang tertib dan baik	Persentase penyelesaian surat penyediaan dana (SPD), surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	Jumlah penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu / Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) x 100 %	%	100	100	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah (sasaran kegiatan ini)	Terselesaikannya SPP SPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Jumlah penyelesaian SPPSPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai / Jumlah SPP SPM yang diterima Belanja Pegawai pada sub bidang Belanja Pegawai x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	47	47	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dokumen laporan pertanggungjawaban fungsional dan	Menyiapkan cek list bahan pengujian atas kebenaran penagihan UP, GU, TU, LS dalam rangka penerbitan SP2D	Jumlah bahan pengujian atas kebenaran penagihan UP, GU, TU, LS dalam rangka penerbitan SP2D	Dok	400	400	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Penerbitan SP2D UP, GU, TU, LS	Membuat penomoran register SP2D UP, GU, TU, LS, register penolakan SP2D, tanda terima SP2D	Jumlah penomoran register SP2D UP, GU, TU, LS, register penolakan SP2D, tanda terima SP2D	Buku	5	5	100%	Sangat Tinggi
	Menyiapkan dan mengetik penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Jumlah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Dok	350	350	100%	Sangat Tinggi
	Mengumpulkan bahan pengujian atas laporan pertanggungjawaban uang persediaan (LPJ-UP) bendahara pengeluaran setiap pengajuan GU/TU persediaan	Jumlah bahan pengujian atas laporan pertanggungjawaban uang persediaan (LPJ-UP) bendahara pengeluaran setiap pengajuan GU/TU persediaan	Dok	200	200	100%	Sangat Tinggi
	Mengumpulkan laporan pertanggungjawaban fungsional yang disampaikan oleh bendahara SKPD yang	Jumlah laporan pertanggungjawaban fungsional yang disampaikan oleh bendahara SKPD yang diserahkan paling lambat tanggal 10 per bulan	Dok	150	150	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
	diserahkan paling lambat tanggal 10 per bulan						
Terfasilitasinya perencanaan realisasi kegiatan fisik/keuangan serta pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen Terlaksananya administrasi perencanaan realisasi kegiatan fisik/keuangan serta pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen Terlaksananya administrasi perencanaan realisasi kegiatan fisik/keuangan serta pengadaan barang dan jasa	Dok	12	12	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya penghimpunan data rencana program/kegiatan BPKPAD	Jumlah dokumen Terlaksananya penghimpunan data rencana program/kegiatan BPKPAD	Jumlah dokumen Terlaksananya penghimpunan data rencana program/kegiatan BPKPAD	Dok	5	5	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya pendistribusian formulir sesuai jadwal untuk	Jumlah dokumen Terlaksananya pendistribusian formulir sesuai jadwal untuk	Jumlah dokumen Terlaksananya pendistribusian formulir sesuai jadwal untuk kelancaran pengumpulan data	Dok	5	5	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
kelancaran pengumpulan data	kelancaran pengumpulan data						
Terfasilitasinya entry data untuk program/kegiatan	Jumlah dokumen Terlaksananya entry data untuk program/kegiatan	Jumlah dokumen Terlaksananya entry data untuk program/kegiatan	Dok	2	2	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya pengumpulan data/bahan pembuatan dokumen	Jumlah dokumen Terlaksananya pengumpulan data/bahan pembuatan dokumen	Jumlah dokumen Terlaksananya pengumpulan data/bahan pembuatan dokumen	Dok	5	5	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya peremajaan data dan informasi	Jumlah dokumen Terlaksananya peremajaan data dan informasi	Jumlah dokumen Terlaksananya peremajaan data dan informasi	Dok	4	4	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terfasilitasinya pengarsipan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen Terlaksananya pengarsipan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen Terlaksananya pengarsipan dokumen perencanaan	Dok	10	10	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya	Jumlah Terlaksananya tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya	Jumlah Terlaksananya tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya	Kali	10	10	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dok	372	372	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dok	277	277	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Lap	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen kelengkapan pencairan Dana Desa	Jumlah dokumen kelengkapan pencairan Dana Desa	Dok	400	400	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen dalam menginput Aplikasi Online Monitoring (SPAN) dari KPPN untuk Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen dalam menginput Aplikasi Online Monitoring (SPAN) dari KPPN untuk Penyaluran Dana Desa	Dok	450	450	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen dalam mengarsipkan kelengkapan berkas permintaan penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen dalam mengarsipkan kelengkapan berkas permintaan penyaluran Dana Desa	Dok	430	430	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya Belanja Tidak Tetap di setiap SKPD	Jumlah dokumen dalam mengecek kelengkapan Bahan Belanja Tidak Tetap (BTT)	Jumlah dokumen dalam mengecek kelengkapan Bahan Belanja Tidak Tetap (BTT)	Dok	5	5	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen dalam menginput Dana Desa	Jumlah dokumen dalam menginput Dana Desa	Dok	400	400	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya Belanja Tidak Tetap di setiap SKPD	Jumlah dokumen dalam menginput BTT (Bahan Belanja Tidak Tetap)	Jumlah dokumen dalam menginput BTT (Bahan Belanja Tidak Tetap)	Dok	400	400	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terlaksananya tugas-tugas lain sesuai dengan tupoksi	Jumlah dokumen dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan	Jumlah dokumen dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan	Dok	12	12	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya Surat Persediaan Dana di setiap SKPD	Jumlah dokumen Menginput SPD	Jumlah dokumen Menginput SPD	Dok	56	56	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya Penyaluran BTT	Jumlah dokumen Menginput dan merekap BTT	Jumlah dokumen Menginput dan merekap BTT	Dok	12	12	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya Penyaluran BTT	Jumlah dokumen dalam Membantu Mengecek Kelengkapan bahan Belanja Tidak Tetap (BTT)	Jumlah dokumen dalam Membantu Mengecek Kelengkapan bahan Belanja Tidak Tetap (BTT)	Dok	20	20	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen Menginput Aplikasi Online Monitoring (SPAN) dari KPPN untuk penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen Menginput Aplikasi Online Monitoring (SPAN) dari KPPN untuk penyaluran Dana Desa	Dok	277	277	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Lap	72	72	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dok	55	55	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya dokumen Penerbitan Daftar Gaji, SKPP, SSBP, SSP, SP2D Belanja Tidak Langsung	Mengumpulkan bahan untuk perubahan berkala, Pangkat PNS SKPD dan Kecamatan	Jumlah bahan untuk perubahan berkala, Pangkat PNS SKPD dan Kecamatan	Dok	275	275	100%	Sangat Tinggi
	Mengetik Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPD) yang terdiri dari Pensiun, Janda, Duda, Pindah	Jumlah Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPD) yang terdiri dari Pensiun, Janda, Duda, Pindah	Dok	110	110	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
	Menyiapkan SP2D Tunjangan Daerah PNS Kabupaten Banjar	Jumlah SP2D Tunjangan Daerah PNS Kabupaten Banjar	Dok	300	300	100%	Sangat Tinggi
	Mencetak Daftar Gaji setiap Bulannya	Jumlah cetak Daftar Gaji setiap Bulannya	Daftar	100	100	100%	Sangat Tinggi
	Menyiapkan SP2D Gaji PNS Kabupaten Banjar	Jumlah SP2D Gaji PNS Kabupaten Banjar	Dok	300	300	100%	Sangat Tinggi
	Mendokumentasikan SP2D Gaji dan Tunjangan Daerah	Jumlah dokumentasi SP2D Gaji dan Tunjangan Daerah	Dok	70	70	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
	Menyiapkan bahan untuk memindahkan pegawai (mutasi) antar Kabupaten /Kota, provinsi dan antar SKPD	Jumlah bahan untuk memindahkan pegawai (mutasi) antar Kabupaten /Kota, provinsi dan antar SKPD	Dok	350	350	100%	Sangat Tinggi
	Mengolah data aplikasi SimGaji yang Pensiun, Pindah dan meninggal dunia Januari s.d Desember 2023	Jumlah data aplikasi SimGaji yang Pensiun, Pindah dan meninggal dunia Januari s.d Desember 2023	Dok	100	100	100%	Sangat Tinggi
	Mengolah daftar Gaji terusan setiap bulannya	Jumlah daftar Gaji terusan setiap bulannya	Dok	100	100	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	Jumlah perangkat daerah dengan laporan keuangan dengan kategori baik / Jumlah seluruh perangkat daerah yang ada di kabupaten Banjar x 100 %	%	85.18	94.40	110.82%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan baik	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan / Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditargetkan x 100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dok	2	2	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						
Terhimpunnya data penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dok	2	2	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lap	18	18	100%	Sangat Tinggi
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lap	18	18	100%	Sangat Tinggi
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dok	1	1	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Lap	2	2	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya data penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Tersedianya data penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah data penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Dok	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya data konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Dok	2	2	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib	Jumlah Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib / Jumlah seluruh perangkat daerah yang ada di kabupaten Banjar x 100 %	%	87.03	88.88	102.12%	Sangat Tinggi
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan / Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ditargetkan x 100%	%	94	94	100%	Sangat Tinggi
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dok	1	1	100%	Sangat Tinggi
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dok	1	1	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Lap	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penggunaan,Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penggunaan,Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok	10	10	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya penatausahaan RKBMD dan RKBMD di kabupaten Banjar	Jumlah dokumen Tercuplik dan Terekapnya laporan RKBMD dan RKPBMMD SKPD	Jumlah dokumen Tercuplik dan Terekapnya laporan RKBMD dan RKPBMMD SKPD	SKPD	24	24	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terfasilitasinya data Pemanfaatan Barang daerah	Jumlah Kegiatan data pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Banjar yang bisa disajikan	Jumlah Kegiatan data pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Banjar yang bisa disajikan	Keg	3	3	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya penatausahaan pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Dok	5	5	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya data BMD yang dimanfaatkan	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Dok	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya penatausahaan RKBMD dan RKBMD di kabupaten Banjar	Jumlah dokumen Tercuplikan dan Terekapnya laporan RKBMD dan RKPBM SKPD	Jumlah dokumen Tercuplikan dan Terekapnya laporan RKBMD dan RKPBM SKPD	SKPD	23	23	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terfasilitasinya data Pemanfaatan Barang daerah	Jumlah Kegiatan data pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Banjar yang bisa disajikan	Jumlah Kegiatan data pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Banjar yang bisa disajikan	Keg	2	2	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya penatausahaan pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Dok	5	5	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya data BMD yang dimanfaatkan	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Dok	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya daftar jaga Kerjasama Pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen daftar jaga Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen daftar jaga Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan BMD	Dok	1	1	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terfasilitasinya Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Terhimpunnya Usulan terkait Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Terhimpunnya Usulan terkait Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Banjar	Dok	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya data dokumen untuk penilaian	Jumlah berkas data dan dokumen BMD yang akan diusulkan penilaian	Jumlah berkas data dan dokumen BMD yang akan diusulkan penilaian	Dok	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya Penilaian BMD	Jumlah daftar hasil penilaian BMD	Jumlah daftar hasil penilaian BMD	Dok	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Lap	1	1	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok	15	15	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lap	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Lap	1	1	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terfasilitasinya penatausahaan Inventarisasi di setiap SKPD	Mengumpulkan dan merekap laporan inventaris SKPD	Jumlah laporan inventaris SKPD	Lap	13	13	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya rekonsiliasi data aset SKPD dengan neraca akuntansi	Merekonsiliasi data aset SKPD dengan data akuntansi	Jumlah Laporan rekonsiliasi data aset SKPD dengan data akuntansi	Lap	4	4	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya pengolahan data laporan inventaris semesteran kabupaten	Mengolah dan menyimpan data dokumen barang milik daerah	Jumlah data dokumen barang milik daerah	Lap	2	2	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya penatausahaan penetapan status penggunaan BMD tahunan Kabupaten	Mengumpulkan dan merekap usul penetapan status penggunaan BMD	Jumlah laporan usul penetapan status penggunaan BMD	Lap	1	1	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terfasilitasinya inventarisasi BMD di Kabupaten	Membantu melakukan inventarisasi/sensus BMD	Jumlah Laporan melakukan inventarisasi/sensus BMD	Lap	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya rekonsiliasi BMD di setiap SKPD di Kabupaten	Menyiapkan bahan rekonsiliasi BMD SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD SKPD	Lap	47	47	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya laporan inventarisasi tahunan	Mengolah data laporan inventaris tahunan kabupaten	Jumlah laporan inventaris tahunan kabupaten	Lap	47	47	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Simda BMD dan pemeriksaan perangkat yang digunakan dalam	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah dan pemeriksaan perangkat yang digunakan	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah dan pemeriksaan perangkat yang digunakan	Lap	12	12	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
pengelolaan barang milik daerah							
Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan	Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Lap	4	4	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten	Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten	Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten	Lap	4	4	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya penyusunan Laporan Unaudited barang milik	Jumlah Laporan Unaudited Kabupaten tahun 2021	Jumlah Laporan Unaudited Kabupaten tahun 2021	Lap	1	1	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
daerah Kabupaten Tahun 2021							
Terlaksananya penyusunan laporan audited barang milik daerah Kabupaten Tahun 2021	Jumlah Laporan audited Kabupaten tahun 2021	Jumlah Laporan audited Kabupaten tahun 2021	Lap	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya penghimpunan data laporan barang milik daerah dari perangkat daerah	Jumlah terhimpunnya data laporan barang milik daerah perangkat daerah se Kabupaten	Jumlah terhimpunnya data laporan barang milik daerah perangkat daerah se Kabupaten	Lap SKPD	47	47	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3		4	5	6	7	8
Terlaksananya peningkatan pajak dan retribusi daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	$\frac{\text{realisasi pajak tahun n} - \text{realisasi pajak tahun n-1}}{\text{realisasi pajak tahun n-1}} \times 100\%$ Keterangan : Rata-rata capaian pertumbuhan dari pajak dan retribusi daerah		%	4	14	350%	Sangat Tinggi
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		Dok	2	2	100%	Sangat Tinggi
Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		Dok	2	2	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Lap	2	2	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Lap	4	4	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya data penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Data Penyusunan Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhimpun	Jumlah Data Penyusunan Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhimpun / Jumlah Data Penyusunan Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhimpun yang di targetkan x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya data penyusun laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase data penyusun laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang terhimpun	Jumlah data penyusun laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang terhimpun / jumlah data penyusun laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang terhimpun yang ditargetkan x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya data penyusunan dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Persentase data penyusunan dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah yang terhimpun	jumlah data penyusunan dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah yang terhimpun / Jumlah data penyusunan dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah yang terhimpun yang di targetkan x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya data penyusunan dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Persentase data penyusunan dokumen rencana pengelolaan pajak daerah yang terhimpun	Jumlah data penyusunan dokumen rencana pengelolaan pajak daerah yang terhimpun / Jumlah data penyusunan dokumen rencana pengelolaan pajak daerah yang	%	100	100	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
		terhimpun yang di targetkan x100%					
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dok	11	11	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dok	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terlaksannanya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dok	2	2	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya Penagihan Pajak Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah / Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah yang di targetkan x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya Data Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Data Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah yang terhimpun	Jumlah Data Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah yang terhimpun / Jumlah Data Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah yang terhimpun yang di targetkan x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase tersusunnya dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah / Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah yang di targetkan x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terhimpunnya data penyusunan dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Persentase data penyusunan dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah yang terhimpun	Jumlah data penyusunan dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah yang terhimpun / Jumlah data penyusunan dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah yang terhimpun yang di targetkan x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Lap	4	4	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Data yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Data yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dok	16	16	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersedianya Sarana dan Prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya data pelaporan pajak daerah yang telah di verifikasi	Persentase Data pelaporan pajak daerah yang telah terhimpun dan diverifikasi	Jumlah Data pelaporan pajak daerah yang telah terhimpun dan diverifikasi / Jumlah Data pelaporan pajak daerah yang telah terhimpun dan diverifikasi yang di targetkan x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Jumlah Plang Parkir yang terpasang	Jumlah Plang Parkir yang terpasang / Jumlah Plang Parkir yang terpasang yang di targetkan x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya data penyusunan laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	Persentase Data Penyusunan Laporan Hasil Pengolahan , pemeliharaan, dan Pelaporan Basis data pajak daerah yang terhimpun	Jumlah Data Penyusunan Laporan Hasil Pengolahan , pemeliharaan, dan Pelaporan Basis data pajak daerah yang terhimpun / Jumlah Data Penyusunan Laporan Hasil Pengolahan , pemeliharaan, dan Pelaporan Basis data pajak daerah yang terhimpun x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi

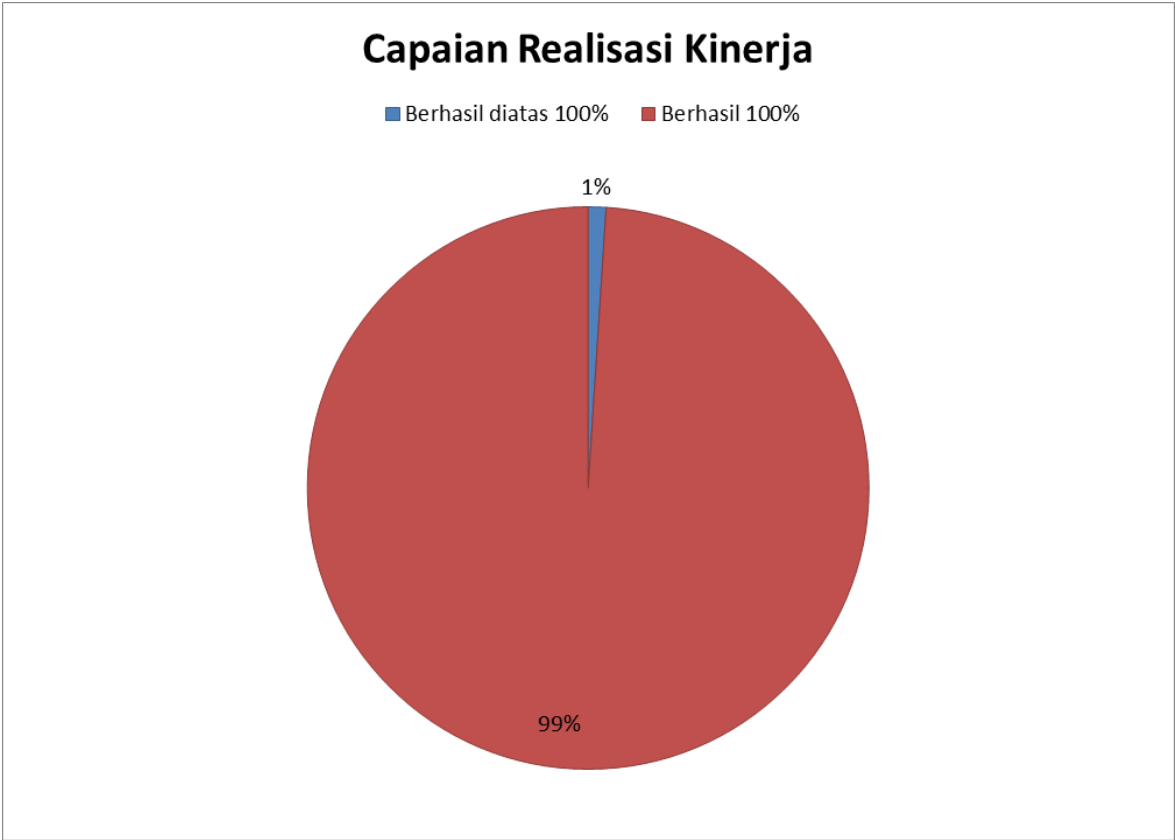
SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3		4	5	6	7	8
Pajak Daerah								
Terlaksananya peningkatan Wajib Pajak Daerah yang patuh	Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	$\frac{\text{jumlah wajib pajak yang patuh}}{\text{jumlah wajib pajak daerah}} \times 100\%$ Keterangan : Rata-rata kepatuhan wajib pajak dari 11 layanan pajak		%	70	88.1	125.85%	Sangat Tinggi
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (11 jenis layanan pajak daerah)	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (11 jenis layanan pajak daerah)		Layanan	11	11	100%	Sangat Tinggi
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar	Jumlah Objek Pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar		Laporan	10	10	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyuluhan data objek dan subjek pajak PBB-P2	Jumlah penyuluhan data objek dan subjek pajak PBB-P2 / Jumlah penyuluhan data objek dan subjek pajak PBB-P2 yang di targetkan x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyusunan data objek dan subjek pajak BPHTB	Jumlah penyusunan data objek dan subjek pajak BPHTB / Jumlah penyusunan data objek dan subjek pajak BPHTB yang di targetkan x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyusunan data objek dan subjek pajak Air Tanah, Hiburan dan Sarang Burung Walet	Jumlah penyusunan data objek dan subjek pajak Air Tanah, Hiburan dan Sarang Burung Walet / Jumlah penyusunan data objek dan subjek pajak Air Tanah, Hiburan dan Sarang Burung Walet yang di targetkan x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyusunan objek dan subjek pajak Hotel, Restoran, Parkir, Reklame dan MBLB	Jumlah penyusunan objek dan subjek pajak Hotel, Restoran, Parkir, Reklame dan MBLB / Jumlah penyusunan objek dan subjek pajak Hotel, Restoran, Parkir, Reklame dan MBLB yang di targetkan x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya kegiatan pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWPD), serta penerbitan NPWPD secara Perjabatan	Tersusunnya laporan penerbitan Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWPD) yang sesuai tepat waktu	Jumlah laporan penerbitan Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWPD) yang sesuai tepat waktu	Lap	10	10	100%	Sangat Tinggi
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	WP	8300	8925	107.53	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame)	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame)	Dok	3	3	100%	Sangat Tinggi
Terhimpunnya objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Persentase Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya / Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya yang di targetkan x100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100%	Sangat Tinggi

Sumber : Data Realisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar 2023



Sumber : Data Realisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar 2023

Berdasarkan data pada tabel 3.2 bahwa hampir semua indikator mencapai 100% (sangat tinggi). Pada tujuan **(1)“Terselenggaranya reformasi dalam sistem penganggaran”**dengan indikator tujuan **“Nilai Opini BPK”** di tahun 2023 Kabupaten Banjar dapat mencapai target dengan memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diberikan oleh BPK. Opini WTP tersebut dapat dicapai karena Kabupaten Banjar dinilai berhasil menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, memenuhi kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, memiliki kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektif dalam sistem pengendalian intern terhadap keberadaan aset serta kelengkapan bukti dan nilai aset. Sasaran **“Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat”** dengan indikator sasaran **“Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)”**telah memenuhi target yaitu **96,02 %**. Nilai indeks tersebut sesuai dengan penilaian Tim Indeks Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pada tujuan **Terselenggaranya reformasi sumber-sumber pendapatan daerah**”dengan target indikator **“Persentase peningkatan pendapatan asli**

daerah (PAD)". Sasaran **"Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah"** dengan indikator sasaran **"Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)** yaitu 30%. Persentase capaian pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 109.47%.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan persentase peningkatan PAD perlu dilakukan perumusan kategori tingkat pencapaiannya. Pada tabel berikut dibuat beberapa kategori tingkat keberhasilan, sebagai berikut :

Kategori Capaian	Uraian	Keterangan
A	apabila rata2 capaian kinerja lebih dari 110%;	Sangat Baik
B	apabila 90% < rata2 capaian kinerja< 110%;	Baik
C	apabila 60% < rata2 capaian kinerja < 90%;	Cukup
D	apabila 40% < rata2 capaian kinerja < 60%	Kurang
E	apabila rata2 capaian kinerja < 40%	Buruk

Sumber Data: Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021

Berdasarkan kategori keberhasilan tabel diatas, bahwa capaian PAD dengan persentase capaian pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 750%. Nilai ini masuk dalam kategori "B" yaitu "Baik".

Berdasarkan hasil rekapitulasi target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 dan 2023 data sampai dengan 31 Desember 2023, Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 109,47%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2022	Target Perubahan 2023	Realisasi 2023	Peningka tan (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	201.527.482.752, 77	250.300.000.000	277.948.453.970,04	111,05 %
Pajak Daerah	93.731.388.091, 00	96.196.000.000,00	109.824.795.009,00	114,17 %
Retribusi Daerah	6.599.136.034,0 0	8.263.062.975,00	8.372.925.539,00	101,33 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.167.770.066,0 0	11.083.090.240,00	8.916.250.334,00	80,45 %
Lain-Lain PAD Yang Sah	94.011.058.809, 77	134.757.846.785,0 0	150.834.483.088,04	111,93%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 31 Desember 2023 dan 2022

Dari ke empat komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut, hanya 2 komponen yang berada dalam wewenang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 109.824.795.009,00 dari target Rp.96.196.000.000,00 dengan peningkatan 114,27%. Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 8.372.925.539,00 dari target Rp.8.263.062.975,00 dengan peningkatan 101,33%.

Capaian peningkatan tersebut diatas target yang hanya 4%. Tetapi secara total peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai 30%, karena salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lain mengalami penurunan pendapatan, yaitu pada kompoenen Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan didalamnya adalah perusahaan daerah yang pada kewenangan tidak berada dibawah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sehingga terdapat kesulitan pada intervensi dan koordinasi untuk meningkatkan PAD. Berdasarkan hasil tersebut, komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang Sah sangat mempengaruhi capaian PAD dan nilai peningkatan PAD maka pada tahun 2024 akan dilaksanakan koordinasi dan intervensi secara lebih massif dan konfrehensif agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar dapat tercapai dengan maksimal.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bag.Laba yg dibagikan kpd Pemda atas Penyertaan Modal pd BUMD (Lemb.Keu), Bag.Laba yg dibagikan kpd Pemda atas Pernyataan Modal pd BUMD (Aneka Usaha),Bag.Laba yg dibagikan kpd Pemda atas Penyertaan Modal pd BUMD (Bid. Air Minum).

A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Sehubungan dengan adanya penambahan sub kegiatan, yang menyebabkan adanya beberapa perbedaan sub kegiatan dengan kegiatan tahun anggaran tahun 2022-2023, sehingga untuk tabel perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya tidak bisa dipenuhi secara presisi. Tetapi dapat dibandingkan dengan indikator yang sama untuk subkegiatan dari tahun anggaran 2022 dengan tahun anggaran 2023.

Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi/Capaian Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	95.29	96,02
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	-5.78	30
Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Peningkatan indeks kepatuhan dan kinerja intern	%	92.57	97.16

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	%	100	100
Terhimpunnya perencanaan perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dok	3	3
Terkumpulnya Penganggaran perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dok	1	1
Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	1
Terhimpunnya Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dok	8	8

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terhimpunnya perencanaan perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dok	1	1
Terkumpulnya Penganggaran perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Lap	2	2
Terhimpunnya Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dok	9	9
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	91
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	-	100

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terhimpunnya dalam membantu membuat SPP	Jumlah berkas dalam penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12
Terhimpunnya pengambilan SPM yang dibuat PPK untuk disampaikan ke BUD agar diterbitkan SP2D	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12	12
Terfasilitasinya membayar dan mencatat setiap transaksi keuangan sesuai dengan belanja kegiatan	Jumlah berkas dalam terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12
Terhimpunnya dan menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari nota permintaan dana	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12	12
Terhimpunnya dalam membantu membuat laporan keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	16	16

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terhimpunnya dalam membantu laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12
Terhimpunnya dalam Membuat SKP	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	1	1
Terhimpunnya dalam Membantu kelengkapan dan penyusunan SPJ	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12
Terhimpunnya Mengerjakan tugas lain sesuai bidang dan tanggung jawab	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	5	5
Terhimpunnya pengumpulan kelengkapan BTT	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terhimpunnya penyiapan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah	Jumlah laporan terlaksananya penyiapan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Dok	1	1
Terhimpunnya pencatatan dan inventarisasi barang milik SKPD	Persentase dokumen terlaksananya pencatatan dan inventarisasi barang milik SKPD	%	100	100
Terhimpunnya pengamanan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang	Jumlah dokumen terlaksananya pengamanan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang	Bulan	12	12
Terhimpunnya dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang SKPD	Jumlah laporan terlaksananya dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang SKPD	Dok	1	1
Terhimpunnya penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan dan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang	Jumlah dokumen terlaksananya penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan dan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang	Dok	4	4

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terhimpunnya penyerahan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang	Jumlah kegiatan terlaksananya penyerahan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang	%	100	100
Terhimpunnya pembuatan kartu inventaris ruangan (KIR) semesteran dan tahunan	Jumlah kegiatan terlaksananya pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan	Bulan	12	12
Terhimpunnya pemberian label pada barang milik daerah dan melakukan stock opname barang milik daerah	Jumlah kegiatan terlaksananya pemberian label pada barang milik daerah dan melakukan stock opname barang milik daerah	Dok	1	1
Terhimpunnya pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjawaban	Jumlah laporan terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjawaban	%	100	100
Terhimpunnya membantu membuat SPP, GU, TU dan LS	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terhimpunnya mengantar/mengambil SPM yang dibuat PPK untuk disampaikan ke BUD agar diterbitkan SP2D dan menyampaikan ke Bank Kalsel untuk pemindahbukuan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12	12
Terhimpunnya membayar dan mencatat setiap transaksi keuangan sesuai dengan belanja kegiatan untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12	12
Terhimpunnya dan menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari nota permintaan dana yang diajukan oleh masing-masing bidang	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	12	12
Terhimpunnya dalam membuat laporan keuangan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	16	16
Terhimpunnya laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	12	12

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terhimpunnya dalam membuat SKPD	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	1	1
Terhimpunnya dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	10	10
Terhimpunnya dalam membantu membuat SPP	Jumlah berkas dalam penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12
Terhimpunnya pengambilan SPM yang dibuat PPK untuk disampaikan ke BUD agar diterbitkan SP2D	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12	12
Terfasilitasinya membayar dan mencatat setiap transaksi keuangan sesuai dengan belanja kegiatan	Jumlah berkas dalam terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terhimpunnya dan menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari nota permintaan dana	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12	12
Terhimpunnya dalam membantu membuat laporan keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	16	16
Terhimpunnya dalam membantu laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12
Terhimpunnya dalam Membuat SKP	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	1	1
Terhimpunnya dalam Membantu kelengkapan dan penyusunan SPJ	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terhimpunnya Mengerjakan tugas lain sesuai bidang dan tanggung jawab	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	5	5
Terhimpunnya dalam membuat Rencana Kerja Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	27	27
Terfasilitasinya dalam membantu membuat SPP dan SPM Gaji dan Tunjangan PNS	Terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	27	27
Terhimpunnya dalam membantu membuat Rencana Kerja Pembayaran Gaji dan Insentif PTT	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	13	13
Terhimpunnya dalam menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari pembayaran	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	27	27

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terhimpunnya dalam menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari pembayaran gaji dan insentif PTT	Terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	13	13
Terhimpunnya dalam membuat SKP	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	1	1
Terfasilitasinya tugas lain sesuai bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	5	5
Terhimpunnya dalam proses dan mengadministrasi setoran penerimaan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Tanda Bukti Pembayaran	Transaksi	70	70
Terhimpunnya proses setoran penerimaan tunai ke Bank KalSel	Tersedianya catatan Register STS Tunai	Transaksi	2000	2000

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terhimpunnya dalam mengadministrasi setoran penerimaan transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Register STS Transfer	Transaksi	2000	2000
Terhimpunnya laporan penerimaan harian	Jumlah laporan yang tersedia	Lap	200	200
Terhimpunnya laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Jumlah laporan yang tersedia	Lap	18	18
Terkumpulnya dalam mengerjakan tugas lain sesuai dengan bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya pendukung administrasi	Keg	1	1
Terhimpunnya dalam proses dan mengadministrasi setoran penerimaan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Tanda Bukti Pembayaran	Transak	70	70

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
		si		
Terhimpunnya proses setoran penerimaan tunai ke Bank KalSel	Tersedianya catatan Register STS Tunai	Transaksi	70	70
Terkumpulnya bahan/data untuk kelengkapan dan penyusunan STS Transfer	Tersedianya catatan STS Transfer	Transaksi	70	70
Terhimpunnya dalam administrasi setoran penerimaan transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Register STS Transfer	Transaksi	2000	2000

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terhimpunnya laporan penerimaan harian	Jumlah laporan yang tersedia	Lap	200	200
Terhimpunnya laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Jumlah laporan yang tersedia	Lap	18	18
Terkumpulnya dalam mengerjakan tugas lain sesuai dengan bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya pendukung administrasi	Keg	1	1
Terhimpunnya dalam proses dan mengadministrasi setoran penerimaan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Tanda Bukti Pembayaran	Transaksi	70	70
Terhimpunnya proses setoran penerimaan tunai ke Bank KalSel	Tersedianya catatan Register STS Tunai	Transaksi	70	70

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terkumpulnya bahan/data untuk kelengkapan dan penyusunan STS Transfer	Tersedianya catatan STS Transfer	Transaksi	2000	2000
Terhimpunnya dalam administrasi setoran penerimaan transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Register STS Transfer	Transaksi	2000	2000
Terhimpunnya laporan penerimaan harian	Jumlah laporan yang tersedia	Lap	200	200
Terhimpunnya laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Jumlah laporan yang tersedia	Lap	18	18

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terkumpulnya dalam mengerjakan tugas lain sesuai dengan bidang dan tanggung jawab	Jumlah pendukung administrasi	Keg	1	1
Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	%	100	-
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100
Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan	%	100	100

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
	ketentuan			
Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan daerah yang tertib dan baik	%	85.40	90
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan baik	Persentase tersusunnya rancangan peraturan daerah (RAPERDA) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tepat waktu	%	100	100
Tersusunnya Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Dok	2	2

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Tersusunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang Disusun	Dok	2	2
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dok	2	2
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Dok	2	96
Terhimpunnya data penyusunan dokumen kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Persentase data penyusunan dokumen kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terhimpun	%	100	100

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dok	3	3
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dok	3	3
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dok	3	3
Tersusunnya bahan Regulasi kebijakan bidang anggaran	Persentase bahan yang akan dijadikan Regulasi serta kebijakan bidang anggaran	%	100	100
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase perangkat daerah dengan penyerapan belanja daerah yang baik	%	100	98.14

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Meningkatnya penyaluran belanja daerah yang tertib dan baik	Persentase penyelesaian surat penyediaan dana (SPD), surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	%	100	100
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah (sasaran kegiatan ini)	Terselesaikannya SPP SPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	%	100	100
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	47	47
Terhimpunnya dokumen laporan pertanggungjawaban fungsional dan Penerbitan SP2D UP, GU, TU, LS	Menyiapkan cek list bahan pengujian atas kebenaran penagihan UP, GU, TU, LS dalam rangka penerbitan SP2D	Dok	400	400
	Membuat penomoran register SP2D UP, GU, TU, LS, register penolakan SP2D, tanda terima SP2D	Buku	5	5

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terfasilitasinya perencanaan realisasi kegiatan fisik/keuangan serta pengadaan barang dan jasa	Menyiapkan dan mengetik penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Dok	350	350
	Mengumpulkan bahan pengujian atas laporan pertanggungjawaban uang persediaan (LPJ-UP) bendahara pengeluaran setiap pengajuan GU/TU persediaan	Dok	200	200
	Mengumpulkan laporan pertanggungjawaban fungsional yang disampaikan oleh bendahara SKPD yang diserahkan paling lambat tanggal 10 per bulan	Dok	150	150
	Jumlah dokumen Terlaksananya administrasi perencanaan realisasi kegiatan fisik/keuangan serta pengadaan barang dan jasa	Dok	12	12
Terfasilitasinya penghimpunan data rencana program/kegiatan BPKPAD	Jumlah dokumen Terlaksananya penghimpunan data rencana program/kegiatan BPKPAD	Dok	5	5

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terfasilitasinya pendistribusian formulir sesuai jadwal untuk kelancaran pengumpulan data	Jumlah dokumen Terlaksananya pendistribusian formulir sesuai jadwal untuk kelancaran pengumpulan data	Dok	5	5
Terfasilitasinya entry data untuk program/kegiatan	Jumlah dokumen Terlaksananya entry data untuk program/kegiatan	Dok	2	2
Terfasilitasinya pengumpulan data/bahan pembuatan dokumen	Jumlah dokumen Terlaksananya pengumpulan data/bahan pembuatan dokumen	Dok	5	5
Terfasilitasinya peremajaan data dan informasi	Jumlah dokumen Terlaksananya peremajaan data dan informasi	Dok	4	4
Terfasilitasinya pengarsipan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen Terlaksananya pengarsipan dokumen perencanaan	Dok	10	10

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terfasilitasinya tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabannya	Jumlah Terlaksananya tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya	Kali	10	10
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dok	376	372
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dok	277	277
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Lap	12	100
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen kelengkapan pencairan Dana Desa	Dok	400	400

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen dalam menginput Aplikasi Online Monitoring (SPAN) dari KPPN untuk Penyaluran Dana Desa	Dok	450	450
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen dalam mengarsipkan kelengkapan berkas permintaan penyaluran Dana Desa	Dok	430	430
Terfasilitasinya Belanja Tidak Tetap di setiap SKPD	Jumlah dokumen dalam mengecek kelengkapan Bahan Belanja Tidak Tetap (BTT)	Dok	5	5
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen dalam menginput Dana Desa	Dok	400	400
Terfasilitasinya Belanja Tidak Tetap di setiap SKPD	Jumlah dokumen dalam menginput BTT (Bahan Belanja Tidak Tetap)	Dok	400	400

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terlaksananya tugas-tugas lain sesuai dengan tupoksi	Jumlah dokumen dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan	Dok	12	12
Terhimpunnya Surat Persediaan Dana di setiap SKPD	Jumlah dokumen Menginput SPD	Dok	56	56
Terfasilitasinya Penyaluran BTT	Jumlah dokumen Menginput dan merekap BTT	Dok	12	12
Terfasilitasinya Penyaluran BTT	Jumlah dokumen dalam Membantu Mengecek Kelengkapan bahan Belanja Tidak Tetap (BTT)	Dok	20	20
Terhimpunnya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen Menginput Aplikasi Online Monitoring (SPAN) dari KPPN untuk penyaluran Dana Desa	Dok	277	277

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Lap	72	72
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dok	54	55
Terhimpunnya dokumen Penerbitan Daftar Gaji, SKPP, SSBP, SSP, SP2D Belanja Tidak Langsung	Mengumpulkan bahan untuk perubahan berkala, Pangkat PNS SKPD dan Kecamatan	Dok	275	275
	Mengetik Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPD) yang terdiri dari Pensiun, Janda, Duda, Pindah	Dok	110	110

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
	Menyiapkan SP2D Tunjangan Daerah PNS Kabupaten Banjar	Dok	300	300
	Mencetak Daftar Gaji setiap Bulannya	Daftar	100	100
	Menyiapkan SP2D Gaji PNS Kabupaten Banjar	Dok	300	300
	Mendokumentasikan SP2D Gaji dan Tunjangan Daerah	Dok	70	70
	Menyiapkan bahan untuk memindahkan pegawai (mutasi) antar Kabupaten /Kota, provinsi dan antar SKPD	Dok	350	350

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
	Mengolah data aplikasi SimGaji yang Pensiun, Pindah dan meninggal dunia Januari s.d Desember 2023	Dok	100	100
	Mengolah daftar Gaji terusan setiap bulannya	Dok	100	100
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	%	100	94.40
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan baik	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	%	100	100
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Dok	2	2

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
Terhimpunnya data penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dok	2	2
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lap	18	18
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lap	18	18
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dok	1	1

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Lap	2	2
Terhimpunnya data penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Tersedianya data penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Dok	1	1
Terhimpunnya data konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Dok	2	2
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib	%	95.74	87.03
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	%	100	94

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dok	1	1
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dok	1	1
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Dok	-	1
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penggunaan,Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok	25	10
Terfasilitasinya penatausahaan RKBMD dan RKBMD di kabupaten Banjar	Jumlah dokumen Terkumpulkan dan Terekapnya laporan RKBMD dan RKPBMMD SKPD	SKPD	24	24

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terfasilitasinya data Pemanfaatan Barang daerah	Jumlah Kegiatan data pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Banjar yang bisa disajikan	Keg	3	3
Terfasilitasinya penatausahaan pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Dok	5	5
Terfasilitasinya data BMD yang dimanfaatkan	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Dok	1	1
Terfasilitasinya penatausahaan RKBMD dan RKBMD di kabupaten Banjar	Jumlah dokumen Tumpulkan dan Terekapnya laporan RKBMD dan RKPBM SKPD	SKPD	23	23
Terfasilitasinya data Pemanfaatan Barang daerah	Jumlah Kegiatan data pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Banjar yang bisa disajikan	Keg	2	2

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terfasilitasinya penatausahaan pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Dok	5	5
Terfasilitasinya data BMD yang dimanfaatkan	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Dok	1	1
Terfasilitasinya daftar jaga Kerjasama Pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen daftar jaga Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan BMD	Dok	1	1
Terfasilitasinya Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Terhimpunnya Usulan terkait Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Banjar	Dok	1	1
Terfasilitasinya data dokumen untuk penilaian	Jumlah berkas data dan dokumen BMD yang akan diusulkan penilaian	Dok	1	1

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terfasilitasinya Penilaian BMD	Jumlah daftar hasil penilaian BMD	Dok	1	1
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Lap	1	1
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok	25	15
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lap	3	1
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Lap	1	1

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terfasilitasinya penatausahaan Inventarisasi di setiap SKPD	Mengumpulkan dan merekap laporan inventaris SKPD	Lap	13	13
Terfasilitasinya rekonsiliasi data aset SKPD dengan neraca akuntansi	Merekonsiliasi data aset SKPD dengan data akuntansi	Lap	4	4
Terfasilitasinya pengolahan data laporan inventaris semesteran kabupaten	Mengolah dan menyimpan data dokumen barang milik daerah	Lap	2	2
Terfasilitasinya penatausahaan penetapan penetapan status penggunaan BMD tahunan Kabupaten	Mengumpulkan dan merekap usul penetapan status penggunaan BMD	Lap	1	1
Terfasilitasinya inventarisasi BMD di Kabupaten	Membantu melakukan inventarisasi/sensus BMD	Lap	1	1

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terfasilitasinya rekonsiliasi BMD di setiap SKPD di Kabupaten	Menyiapkan bahan rekonsiliasi BMD SKPD	Lap	47	47
Terlaksananya laporan inventarisasi tahunan	Mengolah data laporan inventaris tahunan kabupaten	Lap	47	47
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Simda BMD dan pemeriksaan perangkat yang digunakan dalam pengelolaan barang milik daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah dan pemeriksaan perangkat yang digunakan	Lap	12	12
Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan	Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Lap	4	4
Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten	Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten	Lap	4	4

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terlaksananya penyusunan Laporan Unaudited barang milik daerah Kabupaten Tahun 2021	Jumlah Laporan Unaudited Kabupaten tahun 2021	Lap	1	1
Terlaksananya penyusunan laporan audited barang milik daerah Kabupaten Tahun 2021	Jumlah Laporan audited Kabupaten tahun 2021	Lap	1	1
Terlaksananya penghimpunan data laporan barang milik daerah dari perangkat daerah	Jumlah terhimpunnya data laporan barang milik daerah perangkat daerah se Kabupaten	Lap SKPD	47	47
Terlaksananya peningkatan pajak dan retribusi daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	%	13.56	14
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dok	2	2

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dok	2	2
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Lap	8	2
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Lap	4	4
Terhimpunnya data penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Data Penyusunan Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhimpun	%	100	100
Terhimpunnya data penyusun laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase data penyusun laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang	%	100	100

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
	terhimpun			
Terhimpunnya data penyusunan dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Persentase data penyusunan dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah yang terhimpun	%	100	100
Terhimpunnya data penyusunan dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Persentase data penyusunan dokumen rencana pengelolaan pajak daerah yang terhimpun	%	100	100
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dok	11	11
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dok	120	1

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dok	160	2
Terhimpunnya Penagihan Pajak Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	%	100	100
Terhimpunnya Data Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Data Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah yang terhimpun	%	100	100
Terhimpunnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase tersusunnya dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	%	100	100
Terhimpunnya data penyusunan dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Persentase data penyusunan dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah yang terhimpun	%	100	100

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Lap	4	4
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Data yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dok	16	16
Tersedianya Sarana dan Prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	1	1
Terhimpunnya data pelaporan pajak daerah yang telah di verifikasi	Persentase Data pelaporan pajak daerah yang telah terhimpun dan diverifikasi	%	100	100
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Jumlah Plang Parkir yang terpasang	%	100	100

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terhimpunnya data penyusunan laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Data Penyusunan Laporan Hasil Pengolahan , pemeliharaan, dan Pelaporan Basis data pajak daerah yang terhimpun	%	100	100
Terlaksananya peningkatan Wajib Pajak Daerah yang patuh	Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	%	93	88.1
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (11 jenis layanan pajak daerah)	Layanan	3168	11
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar	Lap	11	10
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyuluhan data objek dan subjek pajak PBB-P2	%	100	100

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyusunan data objek dan subjek pajak BPHTB	%	100	100
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyusunan data objek dan subjek pajak Air Tanah, Hiburan dan Sarang Burung Walet	%	100	100
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyusunan objek dan subjek pajak Hotel, Restoran, Parkir, Reklame dan MBLB	%	100	100
Terlaksananya kegiatan pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWPD), serta penerbitan NPWPD secara Perjabatan	Tersusunnya laporan penerbitan Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWPD) yang sesuai tepat waktu	Lap	10	10

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2			
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	8811	8925
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame)	Dok	3	3
Terhimpunnya objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Persentase Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	%	100	100

Sumber : LRFK Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar TA. 2022 dan TA 2023

Berdasarkan data pada tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPKPAD konsisten selalu berada pada kisaran persentase 100%, sehingga capaian indikator program pada BPKPAD dapat dinilai sangat baik.

Dibandingkan dengan realisasi sasaran kinerja pada tahun anggaran 2022, capaian realiasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar secara keseluruhan sudah baik yang tercermin pada besaran capaian indikator yang rata-rata mencapai 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar berhasil dapat melaksanakan seluruh sasaran kinerja yang sudah direncanakan. Untuk tahun 2024 sasaran kinerja yang sudah mencapai target 100% akan terus dipertahankan dengan terus memperbaiki kualitas output yang dihasilkan. Usaha yang dilakukan adalah dengan cara menggerakkan seluruh elemen pejabat dan staf pelaksana yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, membangun komitmen bersama untuk untuk sama-sama meningkatkan kinerja ke depannya, bergerak secara bersama-sama pula untuk menyusun seperangkat kekuatan meminimalisir faktor-faktor penghambat kinerja.

A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2023 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2023 Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2026, untuk mengetahui kemampuan BPKPAD selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dan target capaian periode akhir adalah sebagai berikut:

LKJIP BPKPAD KAB. BANJAR	199

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Periode Akhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Periode Akhir Renstra (2026)	PersentaseCapaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	4	5	6	7
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	96,02	98,61	0,97
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	30	4	7,5

Sumber : Iku & RFK TA. 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Berdasarkan data tabel 3.4 (1) Sasaran Strategis Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat, Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai realisasi pada tahun (2023) 96,02 % target periode akhir Renstra (2026) 98,61 % dengan Persentase Capaian Akhir Renstra (2026) 0,97 %. Dan (2) Sasaran Strategis Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah , Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai realisasi pada tahun (2023) 30 % target periode akhir Renstra (2026) 4% dengan Persentase Capaian Akhir Renstra (2026) 7,5 %.

LKJIP BPKPAD KAB. BANJAR	200

A.4 REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DAN TARGET NASIONAL

TABEL 3.5
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2023, REALISASI PROVINSI DAN NASIONAL

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Provinsi Tahun 2023	Realisasi Nasional Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkatkan	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	73,48	67,47	96,02
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	99,38	96,69	30

Sumber : Data Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-387 Tahun 2023 Hasil Pengukuran IPKAD Tahun 2022

LKJIP BPKPAD KAB. BANJAR	202

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

B.1 SASARAN :

Hasil evaluasi capaian kinerja BPKPAD melalui 2 (dua) sasaran, yaitu:

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	94.34	96,02	101,%	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2.	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan daerah yang tertib dan baik	88.88	90	101.26%	Kepala Bidang Anggaran
3.	Persentase tersusunnya rancangan peraturan daerah (RAPERDA) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tepat waktu	100	100	100%	Kepala Bidang Anggaran
4.	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	2	2	100%	Kasubbid Perencanaan Anggaran
5.	Jumlah Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang Disusun	2	2	100%	Kasubbid Perencanaan Anggaran

6.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2	2	100%	Kasubbid Perencanaan Anggaran
7.	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	96	96	100%	Kasubbid Perencanaan Anggaran
8.	Persentase data penyusunan dokumen kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terhimpun	100	100	100%	Analisis Perencanaan Anggaran
9.	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3	3	100%	Kasubid Penyusunan Anggaran
10.	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3	3	100%	Kasubid Penyusunan Anggaran
11.	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3	3	100%	Kasubid Analisis Kebijakan Anggaran
12.	Persentase bahan yang akan dijadikan Regulasi serta kebijakan bidang anggaran	100	100	100%	Analisis Perencanaan Anggaran
13.	Persentase perangkat daerah dengan penyerapan belanja daerah yang baik	98.14	90.29	92%	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

14.	Persentase penyelesaian surat penyediaan dana (SPD), surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	100	100	100%	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah
15.	Terselesaikannya SPP SPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100	100	100%	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah
16.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	47	47	100%	Kasubid Pengelolaan Belanja Daerah
17.	Menyiapkan cek list bahan pengujian atas kebenaran penagihan UP, GU, TU, LS dalam rangka penerbitan SP2D	400	400	100%	Pengolah Data Belanja Langsung
18.	Membuat penomoran register SP2D UP, GU, TU, LS, register penolakan SP2D, tanda terima SP2D	5	5	100%	Pengolah Data Belanja Langsung
19.	Menyiapkan dan mengetik penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	350	350	100%	Pengolah Data Belanja Langsung
20.	Mengumpulkan bahan pengujian atas laporan pertanggungjawaban uang persediaan (LPJ-UP) bendahara pengeluaran setiap pengajuan GU/TU persediaan	200	200	100%	Pengolah Data Belanja Langsung
21.	Mengumpulkan laporan pertanggungjawaban fungsional yang disampaikan oleh bendahara SKPD yang diserahkan paling lambat tanggal 10 per bulan	150	150	100%	Pengolah Data Belanja Langsung

22.	Jumlah dokumen Terlaksananya administrasi perencanaan realisasi kegiatan fisik/keuangan serta pengadaan barang dan jasa	12	12	100%	Pranata Komputer Ahli Pertama
23.	Jumlah dokumen Terlaksananya pengumpulan data rencana program/kegiatan BPKPAD	5	5	100%	Pranata Komputer Ahli Pertama
24.	Jumlah dokumen Terlaksananya pendistribusian formulir sesuai jadwal untuk kelancaran pengumpulan data	5	5	100%	Pranata Komputer Ahli Pertama
25.	Jumlah dokumen Terlaksananya entry data untuk program/kegiatan	2	2	100%	Pranata Komputer Ahli Pertama
26.	Jumlah dokumen Terlaksananya pengumpulan data/bahan pembuatan dokumen	5	5	100%	Pranata Komputer Ahli Pertama
27.	Jumlah dokumen Terlaksananya peremajaan data dan informasi	4	4	100%	Pranata Komputer Ahli Pertama
28.	Jumlah dokumen Terlaksananya pengarsipan dokumen perencanaan	10	10	100%	Pranata Komputer Ahli Pertama
29.	Jumlah Terlaksananya tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya	10	10	100%	Pranata Komputer Ahli Pertama
30.	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	372	372	100%	Kasubid Penilaian dan Penetapan
31.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,	277	277	100%	Kasubid Penilaian dan

	Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				Penetapan
32.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100	100	100%	Kasubid Penilaian dan Penetapan
33.	Jumlah dokumen kelengkapan pencairan Dana Desa	400	400	100%	Pengelola Data Keuangan Daerah
34.	Jumlah dokumen dalam menginput Aplikasi Online Monitoring (SPAN) dari KPPN untuk Penyaluran Dana Desa	450	450	100%	Pengelola Data Keuangan Daerah
35.	Jumlah dokumen dalam mengarsipkan kelengkapan berkas permintaan penyaluran Dana Desa	430	430	100%	Pengelola Data Keuangan Daerah
36.	Jumlah dokumen dalam mengecek kelengkapan Bahan Belanja Tidak Tetap (BTT)	5	5	100%	Pengelola Data Keuangan Daerah
37.	Jumlah dokumen dalam menginput Dana Desa	400	400	100%	Pengelola Data Keuangan Daerah
38.	Jumlah dokumen dalam menginput BTT (Bahan Belanja Tidak Tetap)	400	400	100%	Pengelola Data Keuangan Daerah
39.	Jumlah dokumen dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan	12	12	100%	Pengelola Data Keuangan Daerah
40.	Jumlah dokumen Menginput SPD	56	56	100%	Analisis Pelaporan dan Transaksi

					Keuangan
41.	Jumlah dokumen Menginput dan merekap BTT	12	12	100%	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
42.	Jumlah dokumen dalam Membantu Mengecek Kelengkapan bahan Belanja Tidak Tetap (BTT)	20	20	100%	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
43.	Jumlah dokumen Menginput Aplikasi Online Monitoring (SPAN) dari KPPN untuk penyaluran Dana Desa	277	277	100%	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
44.	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	72	72	100%	Kasubid Belanja Pegawai
45.	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	55	55	100%	Kasubid Belanja Pegawai
46.	Mengumpulkan bahan untuk perubahan berkala, Pangkat PNS SKPD dan Kecamatan	275	275	100%	Pengadministrasi Umum
47.	Mengetik Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPD) yang terdiri dari Pensiun, Janda,	110	110	100%	Pengadministrasi Umum

	Duda, Pindah				
48.	Menyiapkan SP2D Tunjangan Daerah PNS Kabupaten Banjar	300	300	100%	Pengadministrasi Umum
49.	Mencetak Daftar Gaji setiap Bulannya	100	100	100%	Pengadministrasi Umum
50.	Menyiapkan SP2D Gaji PNS Kabupaten Banjar	300	300	100%	Pengadministrasi Umum
51.	Mendokumentasikan SP2D Gaji dan Tunjangan Daerah	70	70	100%	Pengadministrasi Umum
52.	Menyiapkan bahan untuk memindahkan pegawai (mutasi) antar Kabupaten /Kota, provinsi dan antar SKPD	350	350	100%	Pengadministrasi Umum
53.	Mengolah data aplikasi SimGaji yang Pensiun, Pindah dan meninggal dunia Januari s.d Desember 2023	100	100	100%	Pengadministrasi Umum
54.	Mengolah daftar Gaji terusan setiap bulannya	100	100	100%	Pengadministrasi Umum
55.	Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	85.18	94,40%	110,82%	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
56.	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100	100	100%	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

57.	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	100%	Kasubid Akuntansi Pendapatan
58.	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	100%	Penyusun Laporan Keuangan
59.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18	18	100%	Penyusun Laporan Keuangan
60.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18	18	100%	Kasubid Akuntansi Belanja dan Pembiayaan
61.	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	1	100%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan
62.	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2	2	100%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan
63.	Tersedianya data penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	1	1	100%	Penyusun Laporan Keuangan

64.	Tersedianya jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	2	2	100%	Penyusun Laporan Keuangan
65.	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib	87.03	88.88	102.12%	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
66.	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	94	94	100%	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
67.	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	1	100%	Kasubid Perencanaan dan Pemanfaatan BMD
68.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	1	100%	Kasubid Perencanaan dan Pemanfaatan BMD
69.	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	1	100%	Kasubid Perencanaan dan Pemanfaatan BMD
70.	Jumlah Dokumen Hasil Penggunaan,Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10	10	100%	Kasubid Perencanaan dan Pemanfaatan BMD
71.	Jumlah dokumen Terekumpul dan Terekapnya laporan RKBMD dan RKPBMMD SKPD	24	24	100%	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris

72.	Jumlah Kegiatan data pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Banjar yang bisa disajikan	3	3	100%	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
73.	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	5	5	100%	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
74.	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	1	1	100%	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
75.	Jumlah dokumen Terekumpul dan Terekapnya laporan RKBMD dan RKPBM SKPD	23	23	100%	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
76.	Jumlah Kegiatan data pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Banjar yang bisa disajikan	2	2	100%	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
77.	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	5	5	100%	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
78.	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	1	1	100%	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
79.	Jumlah dokumen daftar jaga Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1	1	100%	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
80.	Jumlah Dokumen Terhimpunnya Usulan terkait Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Banjar	1	1	100%	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
81.	Jumlah berkas data dan dokumen	1	1	100%	Penyusun Kebutuhan

	BMD yang akan diusulkan penilaian				Barang Inventaris
82.	Jumlah daftar hasil penilaian BMD	1	1	100%	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
83.	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	1	100%	Kasubid Pengamanan dan Penghapusan BMD
84.	Jumlah Dokumen Hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15	15	100%	Kasubid Pengamanan dan Penghapusan BMD
85.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	1	100%	Kasubid Penatausahaan BMD
86.	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	1	100%	Kasubid Penatausahaan BMD
87.	Mengumpulkan dan merekap laporan inventaris SKPD	13	13	100%	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
88.	Merekonsiliasi data aset SKPD dengan data akuntansi	4	4	100%	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
89.	Mengolah dan menyimpan data dokumen barang milik daerah	2	2	100%	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
90.	Mengumpulkan dan merekap usul	1	1	100%	Penyusun Kebutuhan

	penetapan status penggunaan BMD				Barang Inventaris
91.	Membantu melakukan inventarisasi/sensus BMD	1	1	100%	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
92.	Menyiapkan bahan rekonsiliasi BMD SKPD	47	47	100%	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
93.	Mengolah data laporan inventaris tahunan kabupaten	47	47	100%	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
94.	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah dan pemeriksaan perangkat yang digunakan	12	12	100%	Pranata Komputer Terampil
95.	Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	4	4	100%	Pranata Komputer Terampil
96.	Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten	4	4	100%	Pranata Komputer Terampil
97.	Jumlah Laporan Unaudited Kabupaten tahun 2021	1	1	100%	Pranata Komputer Terampil
98.	Jumlah Laporan audited Kabupaten tahun 2021	1	1	100%	Pranata Komputer Terampil
99.	Jumlah terhimpunnya data laporan barang milik daerah perangkat	47	47	100%	Pranata Komputer

	daerah se Kabupaten				Terampil
--	---------------------	--	--	--	----------

Tabel 3.6

Sumber : LRFK TA.2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Banjar

Faktor keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Melakukan Pengembangan Sistem Informasi Laporan Keuangan Manajemen Aset yang terintegrasi seluruh SKPD sebagai Pengelolaan Data yang akurat efektif dan dapat dipercaya untuk mendukung Laporan Keuangan.
2. Melakukan monitoring dan memperkuat Fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam mengawal Pelaksana kegiatan SKPD.
3. Melakukan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Serta Sosialisasi untuk memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual.

Faktor penghambat sasaran ini adalah :

1. Kurangnya tertib SKPD menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan dan Manajemen Aset .
2. Belum Optimalnya Pengembangan Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam penyampaian Laporan Keuangan SKPD.
3. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang Belum Terintegrasi Secara Optimal.
4. Proses dalam penilaian terkendala oleh adanya SKPD-SKPD yang penilaiannya belum rampung akan tetapi tetap dilakukan penilaian.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran

1. Masih kurang maksimalnya pengetahuan sumber daya pengelolaan keuangan SKPD tentang pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah serta tentang pengelolaan barang milik daerah

Upaya perbaikan :

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan mengenai pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah serta tentang pengelolaan barang milik daerah secara lebih intensif dan berkelanjutan.

2. Melakukan pembinaan kepada SKPD untuk melakukan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah secara tertib,transfaran dan akuntabel termasuk melakukan rekonsiliasi Aset secara berkesinambungan.

Tindak lanjut yang akan datang :

1. Menambah kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan kepada SKPD
2. Rekonsiliasi Aset BMD tiap pertriwulan, membuat papan nama untuk tanah yang masuk data Aset Daerah.
3. Koordinasi daengan Dinas Pertanahan untuk melaksanakan Sertifikasi tanah ke kantor Pertanahan.
4. Membuat surat edaran ke SKPD untuk melakukan penatausahaan,pemeliharaan dan pengaman aset yang digunakannya.

B.2 SASARAN :

Hasil evaluasi capaian kinerja BPKPAD melalui 2 (dua) sasaran, yaitu :

Tabel 3.7
Realisasi Indikator BPKPAD Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4	30	750%	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2.	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	4	14	350%	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan
3.	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	2	100%	Kasubid Perencanaan dan Pengembangan
4.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	2	100%	Kasubid Perencanaan dan Pengembangan
5.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	2	100%	Kasubid Perencanaan dan Pengembangan
6.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4	4	100%	Kasubid Perencanaan dan Pengembangan
7.	Persentase Data Penyusunan Laporan Hasil pembinaan dan	100	100	100%	Pengadministrasi

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhimpun				Pajak
8.	Persentase data penyusun laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang terhimpun	100	100	100%	Pengadministrasi Pajak
9.	Persentase data penyusunan dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah yang terhimpun	100	100	100%	Analisis Pendapatan Daerah
10.	Persentase data penyusunan dokumen rencana pengelolaan pajak daerah yang terhimpun	100	100	100%	Analisis Pendapatan Daerah
11.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11	11	100%	Kasubid Penagihan Pemeriksaan dan Keberatan
12.	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	1	100%	Kasubid Penagihan Pemeriksaan dan Keberatan
13.	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2	2	100%	Kasubid Penagihan Pemeriksaan dan Keberatan
14.	Persentase tersusunnya Dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	100	100	100%	Pengadministrasi Pajak

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
15.	Persentase Data Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah yang terhimpun	100	100	100%	Analisis Penagihan Pajak
16.	Persentase tersusunnya dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	100	100	100%	Pengadministrasi Pajak
17.	Persentase data penyusunan dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah yang terhimpun	100	100	100%	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah
18.	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	4	100%	Kasubid Pengelolaan Data dan Informasi
19.	Jumlah Dokumen Data yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	16	16	100%	Kasubid Pengelolaan Data dan Informasi
20.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	1	100%	Kasubid Pengelolaan Data dan Informasi
21.	Persentase Data pelaporan pajak daerah yang telah terhimpun dan diverifikasi	100	100	100%	Analisis Pendapatan Daerah
	Persentase Jumlah Plang Parkir yang terpasang	100	100	100%	Analisis Pendapatan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
22.	Persentase Data Penyusunan Laporan Hasil Pengolahan , pemeliharaan, dan Pelaporan Basis data pajak daerah yang terhimpun	100	100	100%	Analisis Pendapatan Daerah
23.	Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	70	88.1	125.85%	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
24.	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (11 jenis layanan pajak daerah)	11	11	100%	Kasubid Pelayanan Pendapatan
25.	Jumlah Objek Pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar	10	10	100%	Kasubid Pendataan, Pendaftaran dan Validasi Objek Pendapatan
26.	Persentase penyuluhan data objek dan subjek pajak PBB-P2	100	100	100%	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah
27.	Persentase penyusunan data objek dan subjek pajak BPHTB	100	100	100%	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah
28.	Persentase penyusunan data objek dan subjek pajak Air Tanah, Hiburan dan Sarang Burung Walet	100	100	100%	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah
29.	Persentase penyusunan objek dan subjek pajak Hotel, Restoran, Parkir, Reklame dan MBLB	100	100	100%	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah
30.	Tersusunnya laporan penerbitan Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWPD)	10	10	100%	Analisis Pajak dan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	yang sesuai tepat waktu				Retribusi Daerah
31.	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8300	8925	107.53	Kasubid Penilaian dan Penetapan Objek Pendapatan
32.	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame)	3	3	100%	Kasubid Penilaian dan Penetapan Objek Pendapatan
33.	Persentase Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	100	100	100%	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah

- ❑ **Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**, indikator kinerja pada tahun 2023 yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memenuhi target yang direncanakan, dengan capaian Berhasil.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi *outcome* dan dibuat secara berjenjang (*cascading*) sampai ke eselon terendah;
2. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan *baseline* data dan cara penghitungannya;
3. Diberlakukannya sistem pajak online; dan
4. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja;
5. Adanya Aplikasi Zona Nilai Tanah (ZNT);
6. Penggunaan Pos pemantau MBLB;
7. Koordinasi dengan pendapatan Rumah Sakit Daerah;
8. Sinergitas dan solidaritas Tim dalam meningkatkan PAD.

Faktor penghambat pencapaian sasaran ini adalah :

- 1. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah masih rendah;
- 2. Data PBB yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada daerah tidak akurat;
- 3. Harga jual tanah transaksi BPHTB belum mengacu pada Zona Nilai Tanah (ZNT);
- 4. Komitmen dalam pencapaian target retribusi daerah belum terlaksana dengan baik;
- 5. Data pendapatan daerah belum tersinkronisasi dengan baik; dan
- 6. Karena adanya pengurangan anggaran atau rasionalisasi anggaran;
- 7. Wajib Pajak yang datanya tidak ada atapaun pindah menjadi hambatan dalam proses peningkatan PAD;
- 8. Masih perlunya peningkatan partisipasi bagi wajib pajak.

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

Masih adanya komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target, namun masih dalam rentang “cukup berhasil”, yaitu komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Upaya perbaikan :

Mengidentifikasi penyebab tidak tercapainya target.

Dari data tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPKPAD dari tahun 2022 sampai dengan 2023 konsisten selalu berada pada kisaran persentase 90% ke atas, sehingga capaian indikator program pada BPKPAD dapat dinilai sangat tinggi. Dibandingkan dengan realisasi indikator program kegiatan pada tahun anggaran 2021, capaian realiasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar dinilai mendapat kemajuan. Berdasarkan data yang diperoleh, secara keseluruhan sudah baik yang tercermin pada besaran capaian indikator yang rata-rata mencapai 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar berhasil dapat melaksanakan seluruh program kegiatan yang sudah direncanakan.

Berdasarkan data pada tabel 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2023 hampir semua program dan kegiatan berhasil mencapai target, jika dibandingkan dengan capaian periode akhir Renstra tahun 2026 untuk capaian realisasi seluruh program dan kegiatan, Badan Pengelolaan

Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah telah mampu sesuai dan mencapai target RPJMD Periode 2021-2026.

Berdasarkan data pada tabel 3.7 dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2023 rata-rata capaian realisasi kinerja sub kegiatan yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar adalah 100%.

Usaha yang dilakukan adalah dengan cara menggerakkan seluruh elemen pejabat dan staf pelaksana yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, membangun komitmen bersama untuk untuk sama-sama meningkatkan kinerja ke depannya, bergerak secara bersama-sama pula untuk menyusun seperangkat kekuatan meminimalisir faktor-faktor penghambat kinerja.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mengelola anggaran sebesar Rp. 285.527.442.669, untuk membiayai pelaksanaan (4) program, (14) kegiatan dan (68) sub kegiatan, dengan pembagian alokasi pembagian Rp. **1.760.286.975.871,00** Belanja Operasi yang terdiri atas Rp. **1.006.647.534.561,00** untuk Belanja Pegawai, Rp. **658.298.459.216,00** Belanja Barang Dan Jasa, Rp. **90.250.288.544,00** untuk Belanja Hibah serta, Rp. **5.090.693.550,00** untuk Belanja Bantuan Sosial, adapun alokasi untuk Belanja Modal adalah sebesar Rp. **414.914.397.830,00**.

Tabel 3.8
Realisasi Jenis Belanja

N o	Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase capaian
1.	Belanja Operasi	1.760.286.975.871,00	1.504.027.963.849,02	85,44%
	a. Belanja Pegawai	1.006.647.534.561,00	806.639.970.419,00	80,13%
	b. Belanja Barang dan Jasa	658.298.459.216,00	604.259.637.529,02	91,79%
	c. Belanja Hibah	90.250.288.544,00	88.112.346.572,00	97,69%
	d. Belanja Bantuan Sosial	5.090.693.550,00	5.016.009.329,00	98,53%
2.	Belanja Modal	414.914.397.830,00	376.369.085.069,96	90,71%

Sumber : Laporan LRA tanggal 31 Desember 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Adapun untuk realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	7	8	9	10
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Rp	233.363.539.350	230.702.537.341	98.85%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	1.360.373.000	1.323.095.585	97%
	Rp	230.960.936.300	228.348.684.656	98.86%
	Rp	501.499.600	497.175.100	99.13%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp	1.360.373.000	1.323.095.585	97%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp	70.000.000	64.464.500	92.09%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Rp	70.000.000	56.050.000	80.07%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Rp	231.474.500	226.369.500	97.79%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp	323.139.200	323.064.200	99.98%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	7	8	9	10
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp	229.100.000	226.490.000	98.86%
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp	65.900.000	58.798.085	89.22%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp	370.759.300	367.859.300	99.22%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp	230.960.936.300	228.348.684.656	100%
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	Rp	140.595.500	137.340.500	97.68%
Koordinasi,Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi,Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp	222.595.762.500	222.595.762.500	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp	27.657.800	27.537.800	99.57%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	126.920.700	126.910.200	99.99%
Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Rp	8.000.000.000	5.397.343.856	67.47%
Koordinasi,Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi,Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang keuangan daerah	Rp	69.999.800	63.789.800	91.13%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp	501.499.600	497.175.100	99%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	7	8	9	10
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rp	72.759.700	71.748.100	98.61%
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp	161.349.600	158.489.600	98.23%
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp	194.155.000	193.702.100	99.77%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp	73.235.300	73.235.300	100%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	540.730.450	533.582.000	99%
Pengelolaan Barang Milik daerah	Rp	540.730.450	533.582.000	99%
Penyusunan Standar Harga	Rp	75.693.000	75.693.000	100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik daerah	Rp	58.314.500	58.289.500	99.96%
Penatausahaan Barang Milik daerah	Rp	200.977.000	197.677.000	98.36%
Pengamanan barang Milik daerah	Rp	54.867.000	54.242.000	98.86%
Penilaian Barang Milik daerah	Rp	56.268.000	56.168.000	99.82%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N
1	7	8	9	10
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan barang Milik daerah	Rp	65.259.950	62.431.500	95.67%
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan barang Milik daerah	Rp	29.351.000	29.081.000	99.08%
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Rp	2.090.361.517	1.951.593.797	93%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	2.090.361.517	1.951.593.797	93%
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	2.090.361.517	1.951.593.797	93%
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Rp	201.902.000	199.931.000	99.02%
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp	110.482.000	110.482.000	100%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp	15.146.500	15.146.500	100%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah	Rp	50.690.000	50.675.250	99.97%
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp	672.448.500	548.665.517	81.59%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	7	8	9	10
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp	16.097.500	16.097.500	100%
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp	22.530.500	22.530.500	100%
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp	6.657.000	6.654.000	99.95%
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp	73.645.100	73.645.100	100%
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp	28.098.900	28.098.900	100%
Penagihan Pajak Daerah	Rp	718.438.000	705.731.150	98.23%
Penyelesaian Keberatan pajak daerah	Rp	6.750.500	6.750.500	100%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah(Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Rp	157.339.017	157.049.880	99,82%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah(Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Rp	10.136.000	10.136.000	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	50.073.541.802	42.511.376.283	85%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	7	8	9	10
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	56.098.100	56.098.100	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Rp	6.657.500	6.657.500	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Rp	3.330.000	3.330.000	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	5.194.500	5.194.500	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	9.250.500	9.250.500	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp	7.111.500	7.111.500	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	15.643.600	15.643.600	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	8.910.500	8.910.500	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	44.018.680.794	36.751.701.507	83%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	43.574.654.994	36.311.555.707	83.33%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	7	8	9	10
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	419.298.000	415.418.000	99.07%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	15.780.000	15.780.000	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp	8.947.800	8.947.800	100%
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp	14.966.260	11.205.900	75%
Penyusunan, Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Rp	2.507.900	2.507.900	100%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	3.024.600	3.024.600	100%
Penatausahaan Barang Milik daerah	Rp	9.433.760	5.673.400	60.13%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1.552.758.380	1.462.601.352	94%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	27.601.500	26.900.000	97.46%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	33.316.500	33.056.500	99.22%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	7	8	9	10
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	87.271.740	72.102.500	82.62%
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Rp	57.110.100	49.633.500	86.91%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	1.347.458.540	1.280.908.852	95.06%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1.156.462.000	1.109.856.594	96%
Pengadaan Mebel	Rp	37.798.000	35.418.000	93.70%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	1.118.664.000	1.074.438.594	96.05%
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Rp	2.038.804.518	1.941.691.175	95%
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	395.154.518	373.846.352	94.61%
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp	1.643.650.000	1.567.844.823	95,39%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.235.771.750	1.178.221.655	95%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	7	8	9	10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Rp	38.990.000	38.986.194	99,99%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan(Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Rp	587.580.000	550.237.461	93,64%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya(Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Rp	106.177.750	104.752.000	98,66%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	310.280.000	303.219.000	97,72%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	135.064.000	134.927.000	99,90%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	57.680.000	46.100.000	79.92%

Untuk Realisasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuanga, Pendapatan dan Aset Daerah dengan realisi keuangan Rp. 285.527.442.669 dari Target Rp. 275.165.507.421 dengan capaian 96%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 42.511.376.283 dari Target Rp. 50.073.541.802 dengan capaian 85%, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan realisasi keuangan Rp. 230.168.955.341 dari Target Rp. 232.822.808.900 dengan capaian 99% , Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan realisasi keuangan Rp. 533.582.000 dari Target Rp. 540.730.450dengan capaian 99%, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan realisasi keuangan Rp. 1.951.593.797 dari Target Rp. 2.090.361.517 dengan capaian 93%.

Untuk perbandingan pencapaian sasaran kinerja dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	94.34	96.02	101.78%	Rp	232.822.808.900	230.168.955.341	99%
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	4	30	750%	Rp	2.090.361.517	1.951.593.797	93%
Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan,	Peningkatan indeks kepatuhan dan kinerja intern	indeks	74	97.16	131.29 %	Rp	50.073.541.802	42.511.376.283	85%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
keuangan, umum dan kepegawaian									
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	Rp	1.360.373.000	1.323.095.585	97%
Terhimpunnya perencanaan perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen	3	3	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terkumpulnya Penganggaran perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen	1	1	100%				
Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%				
Terhimpunnya Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen	8	8	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya perencanaan perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen	1	1	100%				
Terkumpulnya Penganggaran perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Laporan	2	2	100%				
Terhimpunnya Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen	9	9	100%				
Terhimpunnya perencanaan perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen	8	8	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	91	91%	Rp	44.018.680.794	36.751.701.507	83%
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	Rp	14.966.260	11.205.900	75%
Terhimpunnya dalam membantu membuat SPP	Jumlah berkas dalam penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya pengambilan SPM yang dibuat PPK untuk disampaikan ke BUD agar diterbitkan SP2D	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12	12	100%				
Terfasilitasinya membayar dan mencatat setiap transaksi keuangan sesuai dengan belanja kegiatan	Jumlah berkas dalam terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%				
Terhimpunnya dan menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari nota permintaan dana	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12	12	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya dalam membantu membuat laporan keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	16	16	100%				
Terhimpunnya dalam membantu laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%				
Terhimpunnya dalam Membuat SKP	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	1	1	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya dalam Membantu kelengkapan dan penyusunan SPJ	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%				
Terhimpunnya Mengerjakan tugas lain sesuai bidang dan tanggung jawab	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	5	5	100%				
Terhimpunnya pengumpulan kelengkapan BTT	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%				
Terhimpunnya penyiapan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah	Jumlah laporan terlaksananya penyiapan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	1	1	100%				
Terhimpunnya pencatatan dan	Persentase dokumen terlaksananya	%	100	100	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
inventarisasi barang milik SKPD	pencatatan dan inventarisasi barang milik SKPD								
Terhimpunnya pengamanan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang	Jumlah dokumen terlaksananya pengamanan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang	Bulan	12	12	100%				
Terhimpunnya dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang SKPD	Jumlah laporan terlaksananya dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang SKPD	Dokumen	1	1	100%				
Terhimpunnya penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan dan surat permintaan barang (SPB)	Jumlah dokumen terlaksananya penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan dan surat permintaan barang	Dokumen	4	4	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
berdasarkan nota permintaan barang	(SPB) berdasarkan nota permintaan barang								
Terhimpunnya penyerahan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang	Jumlah kegiatan terlaksananya penyerahan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang	%	100	100	100%				
Terhimpunnya pembuatan kartu inventaris ruangan (KIR) semesteran dan tahunan	Jumlah kegiatan terlaksananya pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan	Bulan	12	12	100%				
Terhimpunnya pemberian label pada barang milik	Jumlah kegiatan terlaksananya pemberian label pada	Dokumen	1	1	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
daerah dan melakukan stock opname barang milik daerah	barang milik daerah dan melakukan stock opname barang milik daerah								
Terhimpunnya pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjawaban	Jumlah laporan terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjawaban	%	100	100	100%				
Terhimpunnya membantu membuat SPP, GU, TU dan LS	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%				
Terhimpunnya mengantar/mengambil SPM yang dibuat PPK untuk disampaikan ke BUD agar diterbitkan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12	12	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP2D dan menyampaikan ke Bank Kalsel untuk pemindahbukuan									
Terhimpunnya membayar dan mencatat setiap transaksi keuangan sesuai dengan belanja kegiatan untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12	12	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya dan menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari nota permintaan dana yang diajukan oleh masing-masing bidang	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%				
Terhimpunnya dalam membuat laporan keuangan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	16	16	100%				
Terhimpunnya laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya dalam membuat SKPD	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	1	1	100%				
Terhimpunnya dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	10	10	100%				
Terhimpunnya dalam membantu membuat SPP	Jumlah berkas dalam penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%				
Terhimpunnya pengambilan SPM yang dibuat PPK untuk disampaikan ke BUD agar diterbitkan SP2D	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12	12	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya membayar dan mencatat setiap transaksi keuangan sesuai dengan belanja kegiatan	Jumlah berkas dalam terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%				
Terhimpunnya dan menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari nota permintaan dana	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	12	12	100%				
Terhimpunnya dalam membantu membuat laporan keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	16	16	100%				
Terhimpunnya dalam membantu laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan data	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban									
Terhimpunnya dalam Membuat SKP	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	1	1	100%				
Terhimpunnya dalam Membantu kelengkapan dan penyusunan SPJ	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	12	12	100%				
Terhimpunnya Mengerjakan tugas lain sesuai bidang dan tanggung jawab	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	5	5	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya dalam membuat Rencana Kerja Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	Berkas	27	27	100%				
Terfasilitasinya dalam membantu membuat SPP dan SPM Gaji dan Tunjangan PNS	Terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	27	27	100%				
Terhimpunnya dalam membantu membuat Rencana Kerja Pembayaran Gaji dan Insentif PTT	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	13	13	100%				
Terhimpunnya dalam menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari pembayaran	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	27	27	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya dalam menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari pembayaran gaji dan insentif PTT	Terlaksananya pendukung administrasi	Berkas	13	13	100%				
Terhimpunnya dalam membuat SKP	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	1	1	100%				
Terfasilitasinya tugas lain sesuai bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	Berkas	5	5	100%				
Terhimpunnya dalam proses dan mengadministrasi setoran penerimaan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Tanda Bukti Pembayaran	Transaksi	70	70	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya proses setoran penerimaan tunai ke Bank KalSel	Tersedianya catatan Register STS Tunai	Transaksi	2000	2000	100%				
Terhimpunnya dalam mengadministrasi setoran penerimaan transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Register STS Transfer	Transaksi	2000	2000	100%				
Terhimpunnya laporan penerimaan harian	Jumlah laporan yang tersedia	Laporan	200	200	100%				
Terhimpunnya laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Jumlah laporan yang tersedia	Laporan	18	18	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terkumpulnya dalam mengerjakan tugas lain sesuai dengan bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya pendukung administrasi	Kegiatan	1	1	100%				
Terhimpunnya dalam proses dan mengadministrasi setoran penerimaan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Tanda Bukti Pembayaran	Transaksi	70	70	100%				
Terhimpunnya proses setoran penerimaan tunai ke Bank KalSel	Tersedianya catatan Register STS Tunai	Transaksi	70	70	100%				
Terkumpulnya bahan/data untuk kelengkapan dan penyusunan STS Transfer	Tersedianya catatan STS Transfer	Transaksi	2000	2000	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya dalam mengadministrasi setoran penerimaan transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Register STS Transfer	Transaksi	2000	2000	100%				
Terhimpunnya laporan penerimaan harian	Jumlah laporan yang tersedia	Laporan	200	200	100%				
Terhimpunnya laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Jumlah laporan yang tersedia	Laporan	18	18	100%				
Terkumpulnya dalam mengerjakan tugas lain sesuai dengan bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya pendukung administrasi	Kegiatan	1	1	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya dalam proses dan mengadministrasi setoran penerimaan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Tanda Bukti Pembayaran	Transaksi	70	70	100%				
Terhimpunnya proses setoran penerimaan tunai ke Bank KalSel	Tersedianya catatan Register STS Tunai	Transaksi	70	70	100%				
Terkumpulnya bahan/data untuk kelengkapan dan penyusunan STS Transfer	Tersedianya catatan STS Transfer	Transaksi	2000	2000	100%				
Terhimpunnya dalam mengadministrasi setoran penerimaan transfer sesuai dengan ketentuan	Tersedianya catatan Register STS Transfer	Transaksi	2000	2000	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
yang berlaku									
Terhimpunnya laporan penerimaan harian	Jumlah laporan yang tersedia	Laporan	200	200	100%				
Terhimpunnya laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Jumlah laporan yang tersedia	Laporan	18	18	100%				
Terkumpulnya dalam mengerjakan tugas lain sesuai dengan bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya pendukung administrasi	Kegiatan	1	1	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	Rp	1.552.758.380	1.462.601.352	94%
Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	Rp	1.156.462.000	1.109.856.594	96%
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	Rp	2.038.804.518	1.941.691.175	95%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terselenggaranya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	Rp	1.235.771.750	1.178.221.655	95%
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan daerah yang tertib dan baik	%	88.88	90	101.26%	Rp	1.360.373.000	1.323.095.585	97%
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara	Persentase tersusun nya rancangan peraturan daerah (RAPERDA) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tepat waktu	%	100	100	100%	Rp	1.360.373.000	1.323.095.585	97%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
tertib dan baik									
Tersusunnya Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Dok	2	2	100%	Rp	70.000.000	64.464.500	92,09%
Tersusunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang Disusun	Dok	2	2	100%	Rp	70.000.000	56.050.000	80,07%
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dok	2	2	100%	Rp	370.759.300	367.859.300	99,22%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD									
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Dok	96	96	100%	Rp	231.474.500	226.369.500	97,79%
Terhimpunnya data penyusunan dokumen kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan	Persentase data penyusunan dokumen kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	%	100	100	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Belanja Daerah (APBD)	(APBD) yang terhimpun								
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dok	3	3	100%	Rp	323.139.200	323.064.200	99,98%
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dok	3	3	100%	Rp	229.100.000	226.490.000	98,86%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dok	1	1	100%	Rp	65.900.000	58.798.085	89,22%
Tersusunnya bahan Regulasi kebijakan bidang anggaran	Persentase bahan yang akan dijadikan Regulasi serta kebijakan bidang anggaran	%	100	100	100%				
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase perangkat daerah dengan penyerapan belanja daerah yang baik	%	98.14	90.29	92%	Rp	230.960.936.300	228.348.684.656	98.86%
Meningkatnya penyaluran belanja daerah yang tertib dan baik	Persentase penyelesaian surat penyediaan dana (SPD), surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah	%	100	100	100%	Rp	230.960.936.300	228.348.684.656	98.86%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu								
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah (sasaran kegiatan ini)	Terselesaikannya SPP SPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	Rp	8.000.000.000	5.397.343.856	67,47%
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	47	47	100%	Rp	126.920.700	126.910.200	99,99%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya dokumen laporan pertanggungjawaban fungsional dan Penerbitan SP2D UP, GU, TU, LS	Menyiapkan cek list bahan pengujian atas kebenaran penagihan UP, GU, TU, LS dalam rangka penerbitan SP2D	Dok	400	400	100%				
	Membuat penomoran register SP2D UP, GU, TU, LS, register penolakan SP2D, tanda terima SP2D	Buku	5	5	100%				
	Menyiapkan dan mengetik penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Dok	350	350	100%				
	Mengumpulkan bahan pengujian atas laporan pertanggungjawaban uang persediaan (LPJ-UP) bendahara	Dok	200	200	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pengeluaran setiap pengajuan GU/TU persediaan								
	Mengumpulkan laporan pertanggungjawaban fungsional yang disampaikan oleh bendahara SKPD yang diserahkan paling lambat tanggal 10 per bulan	Dok	150	150	100%				
Terfasilitasinya perencanaan realisasi kegiatan fisik/keuangan serta pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen Terlaksananya administrasi perencanaan realisasi kegiatan fisik/keuangan serta pengadaan barang dan jasa	Dok	12	12	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya pengumpulan data rencana program/kegiatan BPKPAD	Jumlah dokumen Terlaksanan ya pengumpulan data rencana program/kegiatan BPKPAD	Dok	5	5	100%				
Terfasilitasinya pendistribusian formulir sesuai jadwal untuk kelancaran pengumpulan data	Jumlah dokumen Terlaksanan ya pendistribusian formulir sesuai jadwal untuk kelancaran pengumpulan data	Dok	5	5	100%				
Terfasilitasinya entry data untuk program/kegiatan	Jumlah dokumen Terlaksanan ya entry data untuk program/kegiatan	Dok	2	2	100%				
Terfasilitasinya pengumpulan data/bahan pembuatan dokumen	Jumlah dokumen Terlaksanan ya pengumpulan data/bahan pembuatan dokumen	Dok	5	5	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya peremajaan data dan informasi	Jumlah dokumen Terlaksananya peremajaan data dan informasi	Dok	4	4	100%				
Terfasilitasinya pengarsipan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen Terlaksananya pengarsipan dokumen perencanaan	Dok	10	10	100%				
Terfasilitasinya tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya	Jumlah Terlaksananya tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya	Kali	10	10	100%				
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dok	372	372	100%	Rp	140.595.500	137.340.500	97,68%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dok	277	277	100%	Rp	222.595.762.500	222.595.762.500	100%
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Lap	100	100	100%	Rp	8.000.000.000	5.397.343.856	67,47%
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen kelengkapan pencairan Dana Desa	Dok	400	400	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen dalam menginput Aplikasi Online Monitoring (SPAN) dari KPPN untuk Penyaluran Dana Desa	Dok	450	450	100%				
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen dalam mengarsipkan kelengkapan berkas permintaan penyaluran Dana Desa	Dok	430	430	100%				
Terfasilitasinya Belanja Tidak Tetap di setiap SKPD	Jumlah dokumen dalam mengecek kelengkapan Bahan Belanja Tidak Tetap (BTT)	Dok	5	5	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen dalam menginput Dana Desa	Dok	400	400	100%				
Terfasilitasinya Belanja Tidak Tetap di setiap SKPD	Jumlah dokumen dalam menginput BTT (Bahan Belanja Tidak Tetap)	Dok	400	400	100%				
Terlaksananya tugas-tugas lain sesuai dengan tupoksi	Jumlah dokumen dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan	Dok	12	12	100%				
Terhimpunnya Surat Persediaan Dana di setiap SKPD	Jumlah dokumen Menginput SPD	Dok	56	56	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya Penyaluran BTT	Jumlah dokumen Menginput dan merekap BTT	Dok	12	12	100%				
Terfasilitasinya Penyaluran BTT	Jumlah dokumen dalam Membantu Mengecek Kelengkapan bahan Belanja Tidak Tetap (BTT)	Dok	20	20	100%				
Terhimpunnya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen Menginput Aplikasi Online Monitoring (SPAN) dari KPPN untuk penyaluran Dana Desa	Dok	277	277	100%				
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	Lap	72	72	100%	Rp	27.657.800	27.537.800	99,57%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi	Dok	54	54	100%	Rp	69.999.800	63.789.800	91,13%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah								
Terhimpunnya dokumen Penerbitan Daftar Gaji, SKPP, SSBP, SSP, SP2D Belanja Tidak Langsung	Mengumpulkan bahan untuk perubahan berkala, Pangkat PNS SKPD dan Kecamatan	Dok	275	275	100%				
	Mengetik Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPD) yang terdiri dari Pensiun, Janda, Duda, Pindah	Dok	110	110	100%				
	Menyiapkan SP2D Tunjangan Daerah PNS Kabupaten Banjar	Dok	300	300	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mencetak Daftar Gaji setiap Bulannya	Daftar	100	100	100%				
	Menyiapkan SP2D Gaji PNS Kabupaten Banjar	Dok	300	300	100%				
	Mendokumentasikan SP2D Gaji dan Tunjangan Daerah	Dok	70	70	100%				
	Menyiapkan bahan untuk memindahkan pegawai (mutasi) antar Kabupaten /Kota, provinsi dan antar SKPD	Dok	350	350	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mengolah data aplikasi SimGaji yang Pensiun, Pindah dan meninggal dunia Januari s.d Desember 2023	Dok	100	100	100%				
	Mengolah daftar Gaji terusan setiap bulannya	Dok	100	100	100%				
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	%	85.18	94.40	110.82%	Rp	501.499.600	497.175.100	99%
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati	%	100	100	100%	Rp	501.499.600	497.175.100	99%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(Raperbup) pertanggungjawab an pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan baik	(Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan								
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dok	2	2	100%	Rp	194.155.000	193.702.100	99.76%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
Terhimpunnya data penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dok	2	2	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lap	18	18	100%				
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lap	18	18	100%	Rp	72.759.700	71.748.100	98,61%
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dok	1	1	100%	Rp	73.235.300	73.235.300	100%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Lap	2	2	100%	Rp	161.349.600	158.489.600	98,23%
Terhimpunnya data penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Tersedianya data penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Dok	1	1	100%				
Terhimpunnya data konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Dok	2	2	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib	%	87.03	88.88	102.12%	Rp	540.730.450	533.582.000	99%
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	%	94	94	100%	Rp	540.730.450	533.582.000	99%
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dok	1	1	100%	Rp	75.693.000	75.693.000	100%
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dok	1	1	100%	Rp	58.314.500	58.289.500	99,96%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Lap	1	1	100%	Rp	56.268.000	56.168.000	99,82%
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok	10	10	100%	Rp	65.259.950	62.431.500	95,67%
Terfasilitasinya penatausahaan RKBMD dan RKBMD di kabupaten Banjar	Jumlah dokumen Terkumpul an dan Terekapnya laporan RKBMD dan RKPBM SKPD	SKPD	24	24	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya data Pemanfaatan Barang daerah	Jumlah Kegiatan data pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Banjar yang bisa disajikan	Keg	3	3	100%				
Terfasilitasinya penatausahaan pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Dok	5	5	100%				
Terfasilitasinya data BMD yang dimanfaatkan	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Dok	1	1	100%				
Terfasilitasinya penatausahaan RKBMD dan RKBMD di kabupaten Banjar	Jumlah dokumen Terkumpul an dan Terekapnya laporan RKBMD dan RKPBM SKPD	SKPD	23	23	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya data Pemanfaatan Barang daerah	Jumlah Kegiatan data pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Banjar yang bisa disajikan	Keg	2	2	100%				
Terfasilitasinya penatausahaan pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Keg	2	2	100%				
Terfasilitasinya data BMD yang dimanfaatkan	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	Dok	5	5	100%				
Terfasilitasinya daftar jaga Kerjasama Pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen daftar jaga Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan BMD	Dok	1	1	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Terhimpunnya Usulan terkait Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Banjar	Dok	1	1	100%				
Terfasilitasinya data dokumen untuk penilaian	Jumlah berkas data dan dokumen BMD yang akan diusulkan penilaian	Dok	1	1	100%				
Terfasilitasinya Penilaian BMD	Jumlah daftar hasil penilaian BMD	Dok	1	1	100%				
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Lap	1	1	100%	Rp	54.867.000	54.242.000	98,86%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok	15	15	100%	Rp	65.259.950	62.431.500	95,67%
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lap	1	1	100%	Rp	200.977.000	197.677.000	98,36%
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Lap	1	1	100%	Rp	29.351.000	29.081.000	99,08%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya penatausahaan Inventarisasi di setiap SKPD	Mengumpulkan dan merekap laporan inventaris SKPD	Lap	13	13	100%				
Terfasilitasinya rekonsiliasi data aset SKPD dengan neraca akuntansi	Merekonsiliasi data aset SKPD dengan data akuntansi	Lap	4	4	100%				
Terfasilitasinya pengolahan data laporan inventaris semesteran kabupaten	Mengolah dan menyimpan data dokumen barang milik daerah	Lap	2	2	100%				
Terfasilitasinya penatausahaan penetapan penetapan status penggunaan BMD tahunan Kabupaten	Mengumpulkan dan merekap usul penetapan status penggunaan BMD	Lap	1	1	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya inventarisasi BMD di Kabupaten	Membantu melakukan inventarisasi/sensus BMD	Lap	1	1	100%				
Terfasilitasinya rekonsiliasi BMD di setiap SKPD di Kabupaten	Menyiapkan bahan rekonsiliasi BMD SKPD	Lap	47	47	100%				
Terlaksananya laporan inventarisasi tahunan	Mengolah data laporan inventaris tahunan kabupaten	Lap	47	47	100%				
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Simda BMD dan pemeriksaan perangkat yang digunakan dalam pengelolaan barang milik daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah dan pemeriksaan perangkat yang digunakan	Lap	12	12	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan	Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Lap	4	4	100%				
Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten	Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten	Lap	4	4	100%				
Terlaksananya penyusunan Laporan Unaudited barang milik daerah Kabupaten Tahun 2021	Jumlah Laporan Unaudited Kabupaten tahun 2021	Lap	1	1	100%				
Terlaksananya penyusunan laporan audited barang milik daerah Kabupaten Tahun 2021	Jumlah Laporan audited Kabupaten tahun 2021	Lap	1	1	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya pengumpulan data laporan barang milik daerah dari perangkat daerah	Jumlah terhimpunnya data laporan barang milik daerah perangkat daerah se Kabupaten	Lap SKPD	47	47	100%				
Terlaksananya peningkatan pajak dan retribusi daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	%	4	14	350%	Rp	1.315.080.417	1.300.098.680	98,86%
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dok	2	2	100%	Rp	201.902.000	199.931.000	99,02%
Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dok	2	2	100%	Rp	110.482.000	110.482.000	100%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Lap	2	2	100%	Rp	15.146.500	15.146.500	100%
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Lap	4	4	100%	Rp	10.136.000	10.136.000	100%
Terhimpunnya data penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Data Penyusunan Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhimpun	%	100	100	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya data penyusun laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase data penyusun laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang terhimpun	%	100	100	100%				
Terhimpunnya data penyusunan dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Persentase data penyusunan dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah yang terhimpun	%	100	100	100%				
Terhimpunnya data penyusunan dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Persentase data penyusunan dokumen rencana pengelolaan pajak daerah yang terhimpun	%	100	100	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dok	11	11	100%	Rp	718.438.000	705.731.150	98,23%
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dok	1	1	100%	Rp	6.750.500	6.750.500	100%
Terlaksannannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dok	2	2	100%	Rp	157.339.017	157.049.880	99,82%
Terhimpunnya Penagihan Pajak Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	%	100	100	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhimpunnya Data Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Data Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah yang terhimpun	%	100	100	100%				
Terhimpunnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase tersusunnya dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	%	100	100	100%				
Terhimpunnya data penyusunan dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Persentase data penyusunan dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah yang terhimpun	%	100	100	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Lap	4	4	100%	Rp	16.097.500	16.097.500	100%
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Data yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dok	16	16	100%	Rp	28.098.900	28.098.900	100%
Tersedianya Sarana dan Prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	1	1	100%	Rp	50.690.000	50.675.250	99,97%
Terhimpunnya data pelaporan pajak daerah yang telah di verifikasi	Persentase Data pelaporan pajak daerah yang telah terhimpun dan diverifikasi	%	100	100	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Jumlah Plang Parkir yang terpasang	%	100	100	100%				
Terhimpunnya data penyusunan laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Data Penyusunan Laporan Hasil Pengolahan , pemeliharaan, dan Pelaporan Basis data pajak daerah yang terhimpun	%	100	100	100%				
Terlaksananya peningkatan Wajib Pajak Daerah yang patuh	Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	%	70	88.1	125.85%	Rp	775.281.100	651.495.117	84,03%
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (11 jenis layanan pajak daerah)	Layanan	11	11	100%	Rp	73.645.100	73.645.100	100%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar	Laporan	10	10	100%	Rp	672.448.500	548.665.517	81,59%
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyuluhan data objek dan subjek pajak PBB-P2	%	100	100	100%				
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyusunan data objek dan subjek pajak BPHTB	%	100	100	100%				
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyusunan data objek dan subjek pajak Air Tanah, Hiburan dan Sarang Burung Walet	%	100	100	100%				

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyusunan objek dan subjek pajak Hotel, Restoran, Parkir, Reklame dan MBLB	%	100	100	100%				
Terlaksananya kegiatan pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWPD), serta penerbitan NPWPD secara Perjabatan	Tersusunnya laporan penerbitan Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWPD) yang sesuai tepat waktu	Lap	10	10	100%				
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	WP	8300	8925	107.53	Rp	22.530.500	22.530.500	100%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame)	Dok	3	3	100%	Rp	6.657.000	6.654.000	99,95%
Terhimpunnya objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Persentase Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	%	100	100	100%				
BELANJA DAERAH						Rp	2.559.635.131.121,00	2.245.248.394.752,9 ₈	87.72%
BELANJA OPERASI						Rp	1.760.286.975.871,00	1.504.027.963.849,0 ₂	85.44%
BELANJA MODAL						Rp	414.914.397.830,00	376.369.085.069,96	90.71%
BELANJA TIDAK TERDUGA						Rp	8.000.000.000,00	5.889.091.877,00	73.61%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BELANJA TRANSFER						Rp	376.433.757.420,00	375.597.332.761,00	99.78%

Sumber : LRFK TA. 2023 dan LRA TA. 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

LKJIP BPKPAD KAB. BANJAR	300

C.1 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya **mencapai atau lebih dari 100%**. Terlihat bahwa dari sasaran yang diampu BPKPAD, “Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat” dan “Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100 dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 96% dari total anggaran yang dialokasikan. Semua kegiatan yang ada pada program utama mayoritas capaian kinerjanya mencapai 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.11

Efisien Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	101.78 %	99%	1%
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik	750%	93%	7%
Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Peningkatan indeks kepatuhan dan kinerja intern	131.29%	97%	3%
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan	100%	97%	3%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	ketentuan			
Terhimpunnya perencanaan perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100%		
Terkumpulnya Penganggaran perangkat daerah yang berkualitas	Terkumpulnya Penganggaran perangkat daerah yang berkualitas	100%		
Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Terhimpunnya Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100%		
Terhimpunnya perencanaan perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100%		
Terkumpulnya Penganggaran perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100%		
Terhimpunnya Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya perencanaan perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100%		
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	83%	17%
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	75%	25%
Terhimpunnya dalam membantu membuat SPP	Jumlah berkas dalam penyediaan administrasi keuangan	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya pengambilan SPM yang dibuat PPK untuk disampaikan ke BUD agar diterbitkan SP2D	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	100%		
Terfasilitasinya membayar dan mencatat setiap transaksi keuangan sesuai dengan belanja kegiatan	Jumlah berkas dalam terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	100%		
Terhimpunnya dan menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari nota permintaan dana	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	100%		
Terhimpunnya dalam membantu membuat laporan keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya dalam membantu laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	100%		
Terhimpunnya dalam Membuat SKP	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	100%		
Terhimpunnya dalam Membantu kelengkapan dan penyusunan SPJ	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	100%		
Terhimpunnya Mengerjakan tugas lain sesuai bidang dan tanggung jawab	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	100%		
Terhimpunnya pengumpulan kelengkapan BTT	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya penyiapan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah	Jumlah laporan terlaksananya penyiapan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	100%		
Terhimpunnya pencatatan dan inventarisasi barang milik SKPD	Persentase dokumen terlaksananya pencatatan dan inventarisasi barang milik SKPD	100%		
Terhimpunnya pengamanan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang	Jumlah dokumen terlaksananya pengamanan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang	100%		
Terhimpunnya dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang SKPD	Jumlah laporan terlaksananya dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang SKPD	100%		
Terhimpunnya penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan dan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang	Jumlah dokumen terlaksananya penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan dan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya penyerahan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang	Jumlah kegiatan terlaksananya penyerahan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang	100%		
Terhimpunnya pembuatan kartu inventaris ruangan (KIR) semesteran dan tahunan	Jumlah kegiatan terlaksananya pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan	100%		
Terhimpunnya pemberian label pada barang milik daerah dan melakukan stock opname barang milik daerah	Jumlah kegiatan terlaksananya pemberian label pada barang milik daerah dan melakukan stock opname barang milik daerah	100%		
Terhimpunnya pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjawaban	Jumlah laporan terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjawaban	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya membantu membuat SPP, GU, TU dan LS	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	100%		
Terhimpunnya mengantar/mengambil SPM yang dibuat PPK untuk disampaikan ke BUD agar diterbitkan SP2D dan menyampaikan ke Bank Kalsel untuk pemindahbukuan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi	100%		
Terhimpunnya membayar dan mencatat setiap transaksi keuangan sesuai dengan belanja kegiatan untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi	100%		
Terhimpunnya dan menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari nota permintaan dana yang diajukan oleh masing-masing bidang	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya dalam membuat laporan keuangan	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	100%		
Terhimpunnya laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	100%		
Terhimpunnya dalam membuat SKPD	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	100%		
Terhimpunnya dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak	Jumlah berkas Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	100%		
Terhimpunnya dalam membantu membuat SPP	Jumlah berkas dalam penyediaan administrasi keuangan	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya pengambilan SPM yang dibuat PPK untuk disampaikan ke BUD agar diterbitkan SP2D	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	100%		
Terfasilitasinya membayar dan mencatat setiap transaksi keuangan sesuai dengan belanja kegiatan	Jumlah berkas dalam terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	100%		
Terhimpunnya dan menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari nota permintaan dana	Jumlah berkas dalam terlaksananya pendukung administrasi	100%		
Terhimpunnya dalam membantu membuat laporan keuangan	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	100%		
Terhimpunnya dalam membantu laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya dalam Membuat SKP	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	100%		
Terhimpunnya dalam Membantu kelengkapan dan penyusunan SPJ	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	100%		
Terhimpunnya Mengerjakan tugas lain sesuai bidang dan tanggung jawab	Jumlah berkas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	100%		
Terhimpunnya dalam membuat Rencana Kerja Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	100%		
Terfasilitasnya dalam membantu membuat SPP dan SPM Gaji dan Tunjangan PNS	Terlaksananya pendukung administrasi	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya dalam membantu membuat Rencana Kerja Pembayaran Gaji dan Insentif PTT	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	100%		
Terhimpunnya dalam menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari pembayaran	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	100%		
Terhimpunnya dalam menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari pembayaran gaji dan insentif PTT	Terlaksananya pendukung administrasi	100%		
Terhimpunnya dalam membuat SKP	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	100%		
Terfasilitasinya tugas lain sesuai bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya pendukung administrasi keuangan	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya dalam proses dan mengadministarsi setoran penerimaan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Tanda Bukti Pembayaran	100%		
Terhimpunnya proses setoran penerimaan tunai ke Bank KalSel	Tersedianya catatan Register STS Tunai	100%		
Terhimpunnya dalam mengadministarsi setoran penerimaan transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Register STS Transfer	100%		
Terhimpunnya laporan penerimaan harian	Jumlah laporan yang tersedia	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Jumlah laporan yang tersedia	100%		
Terkumpulnya dalam mengerjakan tugas lain sesuai dengan bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya pendukung administrasi	100%		
Terhimpunnya dalam proses dan mengadministrasi setoran penerimaan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Tanda Bukti Pembayaran	100%		
Terhimpunnya proses setoran penerimaan tunai ke Bank KalSel	Tersedianya catatan Register STS Tunai	100%		
Terkumpulnya bahan/data untuk kelengkapan dan penyusunan STS Transfer	Tersedianya catatan STS Transfer	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya dalam mengadministrasi setoran penerimaan transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Register STS Transfer	100%		
Terhimpunnya laporan penerimaan harian	Jumlah laporan yang tersedia	100%		
Terhimpunnya laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Jumlah laporan yang tersedia	100%		
Terkumpulnya dalam mengerjakan tugas lain sesuai dengan bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya pendukung administrasi	100%		
Terhimpunnya dalam proses dan mengadministrasi setoran penerimaan tunai sesuai dengan ketentuan yang	Tersedianya catatan Tanda Bukti Pembayaran	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
berlaku				
Terhimpunnya proses setoran penerimaan tunai ke Bank KalSel	Tersedianya catatan Register STS Tunai	100%		
Terkumpulnya bahan/data untuk kelengkapan dan penyusunan STS Transfer	Tersedianya catatan STS Transfer	100%		
Terhimpunnya dalam mengadministrasi setoran penerimaan transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya catatan Register STS Transfer	100%		
Terhimpunnya laporan penerimaan harian	Jumlah laporan yang tersedia	100%		
Terhimpunnya laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Jumlah laporan yang tersedia	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terkumpulnya dalam mengerjakan tugas lain sesuai dengan bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya pendukung administrasi	100%		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	94%	6%
Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	96%	4%
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	95%	5%
Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	95%	5%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan daerah yang tertib dan baik	100%	97%	3%
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan baik	Persentase tersusunnya rancangan peraturan daerah (RAPERDA) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tepat waktu	100%	97%	3%
Tersusunnya Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	100%	92,09%	7,91%
Tersusunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang Disusun	100%	80,07%	19,93%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100%	99,22%	0,78%
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	100%	97,79%	2,21%
Terhimpunnya data penyusunan dokumen kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Persentase data penyusunan dokumen kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terhimpun	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	99,98%	0,02%
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%	98,86%	1,14%
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	89,22%	10,78%
Tersusunnya bahan Regulasi kebijakan bidang anggaran	Persentase bahan yang akan dijadikan Regulasi serta kebijakan bidang anggaran	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase perangkat daerah dengan penyerapan belanja daerah yang baik	100%	98.86%	1,14%
Meningkatnya penyaluran belanja daerah yang tertib dan baik	Persentase penyelesaian surat penyediaan dana (SPD), surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	100%	98.86%	1,14%
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah (sasaran kegiatan ini)	Terselesaikannya SPP SPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	67,47%	32,53%
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	99,99%	0,01%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya dokumen laporan pertanggungjawaban fungsional dan Penerbitan SP2D UP, GU, TU, LS	Menyiapkan cek list bahan pengujian atas kebenaran penagihan UP, GU, TU, LS dalam rangka penerbitan SP2D	100%		
	Membuat penomoran register SP2D UP, GU, TU, LS, register penolakan SP2D, tanda terima SP2D	100%		
	Menyiapkan dan mengetik penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	100%		
	Mengumpulkan bahan pengujian atas laporan pertanggungjawaban uang persediaan (LPJ-UP) bendahara pengeluaran setiap pengajuan GU/TU persediaan	100%		
	Mengumpulkan laporan pertanggungjawaban fungsional yang disampaikan oleh bendahara SKPD yang diserahkan paling lambat tanggal 10 per bulan	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terfasilitasinya perencanaan realisasi kegiatan fisik/keuangan serta pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen Terlaksananya administrasi perencanaan realisasi kegiatan fisik/keuangan serta pengadaan barang dan jasa	100%		
Terfasilitasinya penghimpunan data rencana program/kegiatan BPKPAD	Jumlah dokumen Terlaksananya penghimpunan data rencana program/kegiatan BPKPAD	100%		
Terfasilitasinya pendistribusian formulir sesuai jadwal untuk kelancaran pengumpulan data	Jumlah dokumen Terlaksananya pendistribusian formulir sesuai jadwal untuk kelancaran pengumpulan data	100%		
Terfasilitasinya entry data untuk program/kegiatan	Jumlah dokumen Terlaksananya entry data untuk program/kegiatan	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terfasilitasinya pengumpulan data/bahan pembuatan dokumen	Jumlah dokumen Terlaksananya pengumpulan data/bahan pembuatan dokumen	100%		
Terfasilitasinya peremajaan data dan informasi	Jumlah dokumen Terlaksananya peremajaan data dan informasi	100%		
Terfasilitasinya pengarsipan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen Terlaksananya pengarsipan dokumen perencanaan	100%		
Terfasilitasinya tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya	Jumlah Terlaksananya tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya	100%		
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%	97,68%	2,32%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	100%	0%
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	67,47%	32,53%
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen kelengkapan pencairan Dana Desa	100%		
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen dalam menginput Aplikasi Online Monitoring (SPAN) dari KPPN untuk Penyaluran Dana Desa	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen dalam mengarsipkan kelengkapan berkas permintaan penyaluran Dana Desa	100%		
Terfasilitasinya Belanja Tidak Tetap di setiap SKPD	Jumlah dokumen dalam mengecek kelengkapan Bahan Belanja Tidak Tetap (BTT)	100%		
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen dalam menginput Dana Desa	100%		
Terfasilitasinya Belanja Tidak Tetap di setiap SKPD	Jumlah dokumen dalam menginput BTT (Bahan Belanja Tidak Tetap)	100%		
Terlaksananya tugas-tugas lain sesuai dengan tupoksi	Jumlah dokumen dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya Surat Persediaan Dana di setiap SKPD	Jumlah dokumen Menginput SPD	100%		
Terfasilitasinya Penyaluran BTT	Jumlah dokumen Menginput dan merekap BTT	100%		
Terfasilitasinya Penyaluran BTT	Jumlah dokumen dalam Membantu Mengecek Kelengkapan bahan Belanja Tidak Tetap (BTT)	100%		
Terhimpunnya Penyaluran Dana Desa	Jumlah dokumen Menginput Aplikasi Online Monitoring (SPAN) dari KPPN untuk penyaluran Dana Desa	100%		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	100%	99,57%	0,43%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	(PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100%	91,13%	8,87%
Terhimpunnya dokumen Penerbitan Daftar Gaji, SKPP, SSBP, SSP, SP2D Belanja Tidak Langsung	Mengumpulkan bahan untuk perubahan berkala, Pangkat PNS SKPD dan Kecamatan	100%		
	Mengetik Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPD) yang terdiri dari Pensiun, Janda, Duda, Pindah	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
	Menyiapkan SP2D Tunjangan Daerah PNS Kabupaten Banjar	100%		
	Mencetak Daftar Gaji setiap Bulannya	100%		
	Menyiapkan SP2D Gaji PNS Kabupaten Banjar	100%		
	Mendokumentasikan SP2D Gaji dan Tunjangan Daerah	100%		
	Menyiapkan bahan untuk memindahkan pegawai (mutasi) antar Kabupaten /Kota, provinsi dan antar SKPD	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
	Mengolah data aplikasi SimGaji yang Pensiun, Pindah dan meninggal dunia Januari s.d Desember 2023	100%		
	Mengolah daftar Gaji terusan setiap bulannya	100%		
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	117.39%	99%	1%
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan baik	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	99%	1%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	99,76%	0,24%
Terhimpunnya data penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%		
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%	98,61%	1,39%
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100%	100%	0%
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	100%	98,23%	1,77%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya data penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Tersedianya data penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	100%		
Terhimpunnya data konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	100%		
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib	100%	99%	1%
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	100%	99%	1%
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	100%	100%	0%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	99,96%	0,04%
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	100%	99,82%	0,18%
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	95,67%	4,33%
Terfasilitasinya penatausahaan RKBMD dan RKBMD di kabupaten Banjar	Jumlah dokumen Terekapnya laporan RKBMD dan RKPBM SKPD	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terfasilitasinya data Pemanfaatan Barang daerah	Jumlah Kegiatan data pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Banjar yang bisa disajikan	100%		
Terfasilitasinya penatausahaan pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	100%		
Terfasilitasinya data BMD yang dimanfaatkan	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	100%		
Terfasilitasinya penatausahaan RKBMD dan RKBMD di kabupaten Banjar	Jumlah dokumen Terekapnya laporan RKBMD dan RKPBM SKPD	100%		
Terfasilitasinya data Pemanfaatan Barang daerah	Jumlah Kegiatan data pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Banjar yang bisa disajikan	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terfasilitasinya penatausahaan pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	100%		
Terfasilitasinya data BMD yang dimanfaatkan	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	100%		
Terfasilitasinya daftar jaga Kerjasama Pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen daftar jaga Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan BMD	100%		
Terfasilitasinya Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Terhimpunnya Usulan terkait Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Banjar	100%		
Terfasilitasinya data dokumen untuk penilaian	Jumlah berkas data dan dokumen BMD yang akan diusulkan penilaian	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terfasilitasinya Penilaian BMD	Jumlah daftar hasil penilaian BMD	100%		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	98,86%	1,14%
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	95,67%	4,33%
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	98,36%	1,64%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	99,08%	0,92%
Terfasilitasinya penatausahaan Inventarisasi di setiap SKPD	Mengumpulkan dan merekap laporan inventaris SKPD	100%		
Terfasilitasinya rekonsiliasi data aset SKPD dengan neraca akuntansi	Merekonsiliasi data aset SKPD dengan data akuntansi	100%		
Terfasilitasinya pengolahan data laporan inventaris semesteran kabupaten	Mengolah dan menyimpan data dokumen barang milik daerah	100%		
Terfasilitasinya penatausahaan penetapan penetapan status penggunaan BMD tahunan Kabupaten	Mengumpulkan dan merekap usul penetapan status penggunaan BMD	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terfasilitasinya inventarisasi BMD di Kabupaten	Membantu melakukan inventarisasi/sensus BMD	100%		
Terfasilitasinya rekonsiliasi BMD di setiap SKPD di Kabupaten	Menyiapkan bahan rekonsiliasi BMD SKPD	100%		
Terlaksananya laporan inventarisasi tahunan	Mengolah data laporan inventaris tahunan kabupaten	100%		
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Simda BMD dan pemeriksaan perangkat yang digunakan dalam pengelolaan barang milik daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah dan pemeriksaan perangkat yang digunakan	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan	Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%		
Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten	Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten	100%		
Terlaksananya penyusunan Laporan Unaudited barang milik daerah Kabupaten Tahun 2021	Jumlah Laporan Unaudited Kabupaten tahun 2021	100%		
Terlaksananya penyusunan laporan audited barang milik daerah Kabupaten Tahun 2021	Jumlah Laporan audited Kabupaten tahun 2021	100%		
Terlaksananya penghimpunan data laporan barang milik daerah dari perangkat daerah	Jumlah terhimpunnya data laporan barang milik daerah perangkat daerah se Kabupaten	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terlaksananya peningkatan pajak dan retribusi daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	350%	98,86%	1,14%
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	99,02%	0,98%
Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100%	100%	0%
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100%	100%	0%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	100%	0%
Terhimpunnya data penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Data Penyusunan Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhimpun	100%		
Terhimpunnya data penyusun laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase data penyusun laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang terhimpun	100%		
Terhimpunnya data penyusunan dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Persentase data penyusunan dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah yang terhimpun	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya data penyusunan dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Persentase data penyusunan dokumen rencana pengelolaan pajak daerah yang terhimpun	100%		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100%	98,23%	1,77%
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100%	100%	0%
Terlaksannnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100%	99,82%	0,18%
Terhimpunnya Penagihan Pajak Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya Data Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Data Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah yang terhimpun	100%		
Terhimpunnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase tersusunnya dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	100%		
Terhimpunnya data penyusunan dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Persentase data penyusunan dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah yang terhimpun	100%		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100%	100%	0%
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Data yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100%	100%	0%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Tersedianya Sarana dan Prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	99,97%	0,03%
Terhimpunnya data pelaporan pajak daerah yang telah di verifikasi	Persentase Data pelaporan pajak daerah yang telah terhimpun dan diverifikasi	100%		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Jumlah Plang Parkir yang terpasang	100%		
Terhimpunnya data penyusunan laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Data Penyusunan Laporan Hasil Pengolahan , pemeliharaan, dan Pelaporan Basis data pajak daerah yang terhimpun	100%		
Terlaksananya peningkatan Wajib Pajak Daerah yang patuh	Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	125.85%	84,03%	15,97%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (11 jenis layanan pajak daerah)	100%	100%	0%
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar	100%	81,59%	18,41%
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyuluhan data objek dan subjek pajak PBB-P2	100%		
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyusunan data objek dan subjek pajak BPHTB	100%		
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyusunan data objek dan subjek pajak Air Tanah, Hiburan dan Sarang Burung Walet	100%		

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Persentase penyusunan objek dan subjek pajak Hotel, Restoran, Parkir, Reklame dan MBLB	100%		
Terlaksananya kegiatan pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWPD), serta penerbitan NPWPD secara Perjabatan	Tersusunnya laporan penerbitan Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWPD) yang sesuai tepat waktu	100%		
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	107.53%	100%	0%
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame)	100%	99,95%	0,05%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terhimpunnya objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Persentase Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	100%		

Sumber : LRFK TA. 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

D.1 EVALUASI KINERJA TAHUN 2023

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja BPKPAD Banjar Tahun 2023 memperoleh nilai evaluasi atas implementasi SAKIP sebesar 79,19 atau predikat “BB” dapat diartikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Sangat Baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Maka pada tahun 2023 direkomendasikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen Renja dengan mengacu pada dokumen Renstra yang telah ditetapkan;
2. Mereviu kembali terhadap penetapan target pada Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan basis data yang memadai;
3. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dengan memastikan sasaran-sasaran yang ada di Perjanjian Kinerja (PK) memuat sasaran-sasaran yang akan diwujudkan dalam Renstra;
4. Melaksanakan pengumpulan data kinerja dan menyajikan informasi capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati;
5. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang sampai dengan staf operasional (individu);
6. Menyusun Laporan Kinerja Tahunan (LKjIP) dengan menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja outcome atau output penting dari semua Perjanjian Kinerja dan memanfaatkan hasil evaluasi serta analisis tersebut untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
7. Memuat secara formal batas waktu rekekomendasi akan ditindaklanjuti sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah disepakati;

8. Menyusun laporan kinerja per individu secara berkala dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebagai langkah dalam pemantauan Rencana Aksi;
9. Menyusun Rencana Aksi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan/jangka menengah.

D.2 TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan penyusun dokumen Renja dengan mengacu pada dokumen Renstra yang telah ditetapkan;

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022

Tujuan/Sasaran/Urutan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		TARGET		PAGU			Alasan Perubahan	
	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Jumlah Perubahan (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9	
	SEBELUM		SESUDAH						
Tujuan	Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja		1. Terselenggaranya reformasi dalam sistem penganggaran						Berdasarkan hasil review dari Inspektorat Tujuan dan sasaran pada Renja awal hanya menggunakan 1 tujuan dan sasaran sesuai dengan tupoksi BPKAD, sedangkan pada Renja Perubahan menggunakan 2 tujuan dan sasaran sesuai dengan Perbup SOTK yang terbaru.
Indikator Tujuan	Nilai Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	2. Terselenggaranya reformasi sumber-sumber pendapatan daerah						
Sasaran	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat		1. Nilai Opini BPK				Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)		
			2. Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)				4%		
Indikator Sasaran	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)		1. Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat				93,09%		
			2. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (IPKAD)				4%		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana		1. Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)				93,09%		
			2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				4%		
			100%	73 Indeks	43.239.296.017	43.649.904.650	410.608.633		

2. Telah dilaksanakan Reviu kembali terhadap penetapan target pada Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan basis data yang memadai;



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022

Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Jumlah (Rp.)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				\$3.661.591.288
KEUANGAN				\$3.661.591.288
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)	93,09	%	43.239.296.017
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	100	%	122.076.493
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100	%	35.076.988
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen RKA PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	14.212.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1	Dokumen	12.573.600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen DPA PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	13.126.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1	Dokumen	13.885.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100	%	15.799.200
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100	%	17.395.405

3. Telah dilaksanakan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dengan memastikan sasaran-sasaran yang ada di Perjanjian Kinerja (PK) memuat sasaran-sasaran yang akan diwujudkan dalam Renstra;



Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target	Formula	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran (outcome), Kegiatan (output) dan Sub	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Data Target pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Tahun 2022	
											Target	Rp
Nilai Opini BPK										VTP	VTP	223.958.300.700
	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)							90,87%	91,84%	93,09%	223.958.300.700
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik						87,03%	222.320.493.100

4. Telah melaksanakan pengumpulan data kinerja dan menyajikan informasi capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati;

PERUMAHAN KINERJA Tahun 2022		PERUMAHAN KINERJA TAHUN 2022 BAGAN PENGELUARAN KEUANGAN, PENGANTARAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BANGKAR	
No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1. Mutabilitas Keuangan dan Asst Daerah (PKAD)	Indeks Pengeluaran (PKAD)	80,00%
	Meningkat		
	Optimalisasi Pengeluaran	Pemantauan Pengeluaran	4%
	Optimalisasi Asst Daerah	Pengelolaan Asst Daerah (PKAD)	
		Program	Anggaran
		1. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 737.801.000
		2. Program Pengelolaan Daerah	1.311.737.511
		3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8.289.250.150
		4. Program Pengawasan Umum Pemerintahan	43.239.295.917
		Daerah Kabupaten/Bandar	
		Maturpura, 12 Januari 2022	
		Phak Khas BUPATI BANGKAR	Phak Partama KEPALA BAKA PENGELUARAN KEUANGAN, PENGANTARAN DAN ASSET DAERAH
		H. SACHO MANUSYU, S.Kom	Dh. ACHMAD NUSANDARI, M.Si Penjabat Kepala BAKA PM 199017419 199802 1 0

Tabel 3.2

Realisasi Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	$IPKAD = (a + b + c + d) : 4$ Keterangan : a = Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik; b = Persentase perangkat daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak; c = Persentase perangkat daerah dengan penyajian laporan keuangan dengan kategori baik; d = Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib.	%	93.09	96.35	103.50 %	Sangat Tinggi

5. Telah dilaksanakan pengukuran kinerja secara berjenjang sampai dengan staf operasional (individu);

[illegible]

6. Telah dilaksanakan Laporan Kinerja Tahunan (LKjIP) dengan menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja outcome atau output penting dari semua Perjanjian Kinerja dan memanfaatkan hasil evaluasi serta analisis tersebut untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;



7. Telah Memuat secara formal batas waktu rekekomendasi akan ditindaklanjuti sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah disepakati;



8. Telah Menyusun laporan kinerja per individu secara berkala dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebagai langkah dalam pemantauan Rencana Aksi;

TARGET	sasaran program, leg dan sub	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	Target KINERJA		
TW 1 = 100% TW 2 = 100% TW 3 = 100% TW 4 = 100%	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI)	73 INDEKS TW 1 = 12 Dok, 11 Lap, 3 Bulan, 3 Paket, 25 Unit TW 2 = 14 Dok, 11 Lap, 4 Bulan, 9 Paket, 26 Unit TW 3 = 14 Dok, 11 Lap, 3 Bulan, 2 Orang, 9 Paket, 26 Unit TW 4 = 14 Dok, 12 Lap, 4 Bulan, 1 Orang, 9 Paket, 26 Unit	43.239.296.017	TW 1 = 27,3% TW 2 = 38,4% TW 3 = 16,7% TW 4 = 23,6%	Januari	Februari
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	5.2.1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang terusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	100% 11 Dokumen & 19 Laporan	122.076.493	TW 1 = 26,7% TW 2 = 30% TW 3 = 16,7% TW 4 = 26,7%		
	Terusunnya Dokumen Perencanaan Daerah	5.2.1.2.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan PD yang terusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100% 7 Dokumen (Penyusunan Rencana/Perencanaan RKY 2022, Penyusunan Rencana Baku 2022, Penyusunan Perjanjian Kinerja/Perencanaan Berjangka n+1 (2023), Penyusunan Perubahan Berjangka n+1 (2023), Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja (2022))	35.076.988	TW 1 = TW 2 = 5 dokumen TW 3 = TW 4 = 2 dokumen	10.244.114	2.782.100

9. Telah dilaksanakan penyusunan Rencana Aksi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan/jangka menengah;

TARGET	sasaran program, leg dan sub	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	Target KINERJA		
TW 1 = 100% TW 2 = 100% TW 3 = 100% TW 4 = 100%	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI)	73 INDEKS TW 1 = 12 Dok, 11 Lap, 3 Bulan, 3 Paket, 25 Unit TW 2 = 14 Dok, 11 Lap, 4 Bulan, 9 Paket, 26 Unit TW 3 = 14 Dok, 11 Lap, 3 Bulan, 2 Orang, 9 Paket, 26 Unit TW 4 = 14 Dok, 12 Lap, 4 Bulan, 1 Orang, 9 Paket, 26 Unit	43.239.296.017	TW 1 = 27,3% TW 2 = 38,4% TW 3 = 16,7% TW 4 = 23,6%	Januari	Februari
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	5.2.1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang terusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	100% 11 Dokumen & 19 Laporan	122.076.493	TW 1 = 26,7% TW 2 = 30% TW 3 = 16,7% TW 4 = 26,7%		
	Terusunnya Dokumen Perencanaan Daerah	5.2.1.2.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan PD yang terusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100% 7 Dokumen (Penyusunan Rencana/Perencanaan RKY 2022, Penyusunan Rencana Baku 2022, Penyusunan Perjanjian Kinerja/Perencanaan Berjangka n+1 (2023), Penyusunan Perubahan Berjangka n+1 (2023), Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja (2022))	35.076.988	TW 1 = TW 2 = 5 dokumen TW 3 = TW 4 = 2 dokumen	10.244.114	2.782.100

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan di pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun pertama Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan untuk ditingkatkan, sementara itu untuk target-target yang selama ini belum tercapai secara maksimal perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa target kinerja sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis dikategorikan “**Berhasil**”, (1) Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) dan target 94,34 %. Berdasarkan hasil penilaian Tim Indeks Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah didapat nilai indeks 96,02 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik. Untuk Sasaran strategis (2)Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikatorp Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)dengan target meningkat 4. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 30%.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan persentase peningkatan PAD perlu dilakukan perumusan kategori tingkat pencapaiannya.Pada tabel berikut dibuat beberapa kategori tingkat keberhasilan, sebagai berikut :

Kategori Capaian	Uraian	Keterangan
A	apabila rata2 capaian kinerja lebih dari 110%;	Sangat Baik
B	apabila 90% < rata2 capaian kinerja< 110%;	Baik
C	apabila 60% < rata2 capaian kinerja < 90%;	Cukup
D	apabila 40% < rata2 capaian kinerja < 60%	Kurang
E	apabila rata2 capaian kinerja < 40%	Buruk

Sumber Data: Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021

Berdasarkan kategori keberhasilan tabel diatas, bahwa capaian PAD dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 30%. Nilai ini masuk dalam kategori “B” yaitu “Baik”.

Berdasarkan hasil rekapitulasi target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 dan 2023 data sampai dengan 31 Desember 2023, Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 109,47%.

Uraian	Realisasi 2022	Target Perubahan 2023	Realisasi 2023	Peningkatan (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	201.527.482.752,77	250.300.000.000	277.948.453.970,04	111,05 %
Pajak Daerah	93.731.388.091,00	96.196.000.000,00	109.824.795.009,00	114,17 %
Retribusi		8.263.062.975,00	8.372.925.539,00	101,33 %

Daerah	6.599.136.034,0 0			
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.167.770.066,0 0	11.083.090.240,00	8.916.250.334,00	80,45 %
Lain-Lain PAD Yang Sah	94.011.058.809, 77	134.757.846.785,0 0	150.834.483.088,04	111,93%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 31 Desember 2023 dan 2022

Dari ke empat komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut, hanya 2 komponen yang berada dalam wewenang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 109.824.795.009,00 dari target Rp.96.196.000.000,00 dengan peningkatan 114,17%. Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 8.372.925.539,00 dari target Rp.8.263.062.975,- dengan peningkatan 101,33%.

Capaian peningkatan tersebut diatas target yang hanya 4%. Tetapi secara total peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai 30%, karena salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lain mengalami penurunan pendapatan, yaitu pada kompoenen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan didalamnya adalah perusahaan daerah yang pada kewenangan tidak berada dibawah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sehingga terdapat kesulitan pada intervensi dan koordinasi untuk meningkatkan PAD. Berdasarkan hasil tersebut, komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang Sah sangat mempengaruhi capaian PAD dan nilai peningkatan PAD maka pada tahun 2024 akan dilaksanakan koordinasi dan intervensi secara lebih massif dan konfhrensif agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar dapat tercapai dengan maksimal.

Dari Total Pagu Belanja Langsung yang tersedia sebesar Rp. 275.165.507.421,- dengan realisasi keuangan s.d 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 285.527.442.669,- atau 96%, yang berarti anggaran dana terserap secara optimal.

Dari Total Pagu Belanja Langsung tersebut diantaranya terdapat Dana Desa sebesar Rp.222.580.763.000,00 yang berhasil disalurkan sebesar Rp. 222.580.763.000,00 atau 100% yang berarti dana telah berhasil tersalurkan secara maksimal kepada seluruh desa di Kabupaten Banjar.

Dari Total Pagu Belanja Langsung tersebut juga terdapat Dana Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 8.000.000.000,- yang berhasil disalurkan sebesar Rp. 5.397.343.856,- atau 67,47% yang berarti dana berhasil tersalurkan secara maksimal kepada perangkat daerah pengampu, yang kemudian disalurkan langsung hingga ke masyarakat.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah secara utuh dan terukur. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan pada Tahun Anggaran 2024.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di tahun selanjutnya.

B. SARAN-SARAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Martapura 31 Januari 2024

Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar

Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si

NIP. 19660104 198602 1 004